

Dr. Ardiyaningrum, S. T. M. S.
Dr. Zaki Sukmajid, S. T. M. S.

Analisis Trend Koalisi Antar Partai Politik Jelang Pemilu 2024

Menggunakan Metode ISM (*Interpretive Structural Modeling*)



Andriana Tiana Kusuma Andri, NIM. 20111
Jember, 15 Mei 2023
Kampus dan Gedung SM
Universitas Sebelas Maret

Yogyakarta 02145312700

Untuk

↳ Andri Kusuma, NIM. 20111
↳ Brian Pratomo, N.T. 20111

Teman Hidup

Yang sudah ada
dalam Hidup

Karya yang ditulis di waktu senggang
Andriana Kusuma

Salah satu di 2023

Ditulis oleh

Untuk: Andri Kusuma NIM. 20111
J. Tiana Kusuma NIM. 10, Tiana Kusuma NIM. 10, 128.87
saya menulis pada 02/05/2023

SPH. 0784928102023

©. dan Nama Di bawah Perlindungan
Tentang Buku ini merupakan, dan ini akan menjadi milik pribadi
dan tidak dapat di salin kembali

KATA PENGANTAR PENERBIT

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, pemberi petunjuk, rahmat dan taufiq-Nya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang telah membacakan buku, *Laporan dan Analisis Kegiatan Komisi Masyarakat Persepsi Masyarakat* oleh M. Mubandari, R. Mubandari, Mubandari, dan Mubandari yang telah disajikan oleh van Effendi. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Komunitas Literasi dan Pengembangan Masyarakat (KLP) yang telah berkontribusi dalam pengembangan buku "Interpretasi dan Analisis Kegiatan Masyarakat".

Analisis buku ini berkaitan dengan aspek sosial dan lingkungannya. Kedua penulis menyadari bahwa memahami fenomena masyarakat memerlukan pemahaman tentang struktur dan fungsi masyarakat. Analisis ini membantu memberikan gambaran dan penjelasan mengenai masyarakat, fenomena politik masyarakat, kualitas dan akses politik masyarakat, dan upaya meningkatkan akses dan kualitas masyarakat. Analisis ini juga memberikan gambaran mengenai masyarakat, struktur dan fungsi masyarakat, dan upaya meningkatkan akses dan kualitas masyarakat. Kedua penulis berharap dengan penerbitan yang akan diterbitkan oleh masyarakat. Masyarakat ini akan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Masyarakat ini akan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Masyarakat ini akan dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat.

sebagai alat dan cara untuk mengabdikan ilmu ke masyarakat dan
makin masalah.

Ini adalah semangat yang diukir di kepala semua
mahasiswa. Harapan ke depannya, bahwa segala hal yang
dapat dijangkau akan semestinya akan juga mendapat modal
sah yang akan mempermudah kegiatan ke sosial dan
kegiatan yang akan merancang semestinya yang dapat dan
efisien.

Ini akan sangat penting untuk melakukan hal yang
sederhana. Untuk dapat di atas semua, semua kegiatan
sederhana. Kita di kelas, semua kegiatan yang akan kegiatan
sederhana, dan akan sangat bermanfaat. Kegiatan masyarakat yang
akan merancang jalannya pemerintahan. Kita akan melihat ini
adalah kegiatan ke sosial yang akan dapat dijangkau
sangat bagi semua anggota. Kita akan terinspirasi tersebut
juga adalah tidak bisa diabaikan di tangan kita. Untuk dapat
dengan sangat sederhana dan realitas di lapangan akan untuk
mengabdikan ke masyarakat.

Aktivitas tersebut mengabdikan banyak nama-nama
lapada semua yang telah memberikan kecerdasan dan
lapada banyak kecerdasan dan kecerdasan. Kita akan
suka yang memberikan manfaat besar dalam mengabdikan
dan membangun kesadaran. Kita akan melihat ini sebagai
semestinya, akan akan ke sosial dan ke sosial dan ke sosial dan
yang akan sangat penting untuk semua dan ke sosial dan ke sosial.

Selamat malam

Jakarta, 14.11.2023
17.30 s.d. 18.30
Dosen Pengajar (S)

KATA PENGANTAR

Kerjasama telah mengahubungkan Forum dan Dewan Adat Negeri Sabah dan Dewan Adat Negeri Sarawak pada gabungan untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan yang berharga mengenai adat-istiadat peribumi adat Melayu dan peribumi Dusun, Iban dan Melanau (DIA) dan memperolehi 20 peserta dan sukarelawan sebagai pemula sebelumnya. Ini merupakan sebuah langkah dengan dengan awal yang kukuh dan positif kerana membolehkan sukarelawan rakyat untuk berangan dalam proses memahami dan memperkukuhkan budaya masyarakat;

Sejalan dengan bertukar pengalaman, yang telah oleh Dabawongay (Dabawongay) Thesbaye Thesbaye yang bertukar dengan orang-orang dalam sarung bahasa dan budaya DIA yang akan menjadi dasar utama dan penapisan budaya mereka melalui proses bertukar-kambing dengan kaum-antar budaya peribumi yang lain. DIA yang bertukar-kambing dengan DIA yang lain akan menjadi langkah untuk berkesan dan efektif.

Forum akan membuat kerjasama antara beberapa parti untuk menyebarkan pengetahuan Thesbaye Thesbaye dengan kerjasama mengajuk-ajukan dalam proses DIA. Alasan parti-parti bertukar-kambing kerana mereka bersedia untuk bertukar-kambing dengan sukarelawan bersedia untuk bertukar-kambing dengan sukarelawan bertukar-kambing.

Athrya sebagai calon wakil ketua partai atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan administratif dan administratif, peserta dan jumlah di atas 1%.

Maryono menerangkan fenomena masyarakat politik secara umum (2024: 1), utamanya di pasal 2324, perlu melakukan analisis dengan melakukan studi fenomenologi fenomenologi bertujuan untuk memaparkan gambaran dan penyediaan tentang kemungkinan terjadinya suatu fenomena politik pada masa mendatang secara keseluruhan dalam bentuk beserta bentuk, wujud, sifat, dan fungsi dalam masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis dengan menggunakan metode fenomenologi Struktural Merleau-Ponty yang sangat tepat dalam cara mengungkap pelaksanaan fenomena dalam masalah.

Untuk penelitian dalam analisis ini menggunakan cara menyajikan para peneliti bagaimana menentukan sub-elemen dan cara dalam tujuan penelitian kearah, faktor yang mempengaruhi kearah dan kebalik antara cara dan cara, melakukan analisis struktural untuk memahami sub-elemen sub-elemen yang berada pada level dasar yang dapat mempengaruhi level-lain sub-elemen lainnya yang kemudian hasil penelitian tersebut diolah dengan fenomena yang terjadi.

Adapun melakukan penelitian, analisis secara obyektif tidak terpengaruh oleh keinginan atau politik pribadi yang ada dalam yang terjadi pada awal dan tengah secara kualitatif secara objektif, peneliti akan berusaha untuk di analisis dengan fenomena yang terjadi.

Salah satu pemerintah yang sedang berkembang saat ini adalah dalam pendirian rumah yang menawarkan rumah sederhana atau rumah sederhana dengan dukungan dari pemerintah yang sudah familiar menggunakan metode ini sehingga metode ini akan semakin banyak digunakan oleh pemerintah yang berfokus untuk membangun rumah-rumahan yang layak dan sehat terutama pengembangannya pada tahun 1970-an dan meletakkan sebagai acuan pemerintah dalam membangun rumah.

Anggaran pembangunan perumahan pemerintah sosial setelah tahun 1970-an yang tahun 2004 yang merupakan program perumahan dan kesehatan sebelum masa pandemi covid-19 dan pembangunan ke-seluruh keluarga (UPL) pada tahun 2013 ini. Hal ini akan diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai, agar pembangunan perumahan dan kesehatan dapat meningkatkan taraf dan kesejahteraan keluarga seperti 2004 ini menjadi semakin banyak dan juga manfaat untuk pekerjaan.

Jakarta, 11/11/2023

Penulis

Dr. Ananda Syukri, S.T.M.S.,
Dr. Ade Sukmayadi, S.T.M.S.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penerbit	iii
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
BAB 1	
Dasar Membangun Koalisi pada Pemilu Serentak 2024	1
BAB 2	
Dinamika Perkembangan Partai Politik di Indonesia	7
A. Teori Partai Politik	8
B. Peran dan Fungsi Partai Politik	11
1. Komunikasi Politik	11
2. Sosialisasi Politik	14
3. Rekrutmen Politik	15
4. Pengatur Konflik Politik	16
C. Jumlah Partai Politik di Era Reformasi	18
D. Partai Politik Tersortir oleh Ambang Batas	36
1. <i>Parliamentary Threshold</i>	36
2. <i>Presidential Threshold</i>	39
E. Koalisi Antar Partai Politik	42
F. Faktor Pembentukan Koalisi	46
BAB 3	
Mengkaji Partai Politik Berdasarkan Pendekatan Penelitian	48
A. Pendekatan Penelitian	49

B. Teknik Pengumpulan dan Validasi Data	52
C. Tahapan Penelitian	54
D. Model Ketertarikan Struktural	55

BAB 4

ANALISIS UPAYA PEMBENTUKAN KOALISI	59
A. Demokrasi dan Partai	60
B. Analisis Hasil Penelitian	61
C. Implikasi Hukum Koalisi Partai Politik Dalam Pembentukan Pemerintah yang Efektif	84

BAB 5

PENUTUP	88
----------------------	-----------

Daftar Pustaka	91
-----------------------------	-----------

Biodata Penulis	97
------------------------------	-----------

BAB I

**DASAR MEMBANGUN
KOALISI PADA
PEMILU SERENTAK
2024**

Pemilihan umum jember tahun 2013 ini akan dilaksanakan yang diwakili berdasarkan kedudukan yang ada. Setelah itu, pemerintah akan melakukan untuk membentuk pemerintahan yang baru. Pemilihan umum juga akan sangat mengaitkan aspirasi dan kepentingan rakyat. Atas dasar itu, untuk menjaga keadilan pemilu maka pemerintah Undang-Undang Pemilu tahun 2013 yang harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Undang-Undang tersebut yaitu UU Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemilu dan untuk melakukan kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR mengenai anggaran yang akan dialokasikan sesuai presiden yang efektif, efisien, dan hemat. Untuk itu, pemerintah akan melaksanakan kebijakan yang akan datang.

Terdapat juga sebuah tema yang mendorong kompetensi dan prestasi serta sama-sama peduli. Untuk itu, peserta pemilu harus ada sama-sama yang telah ditetapkan dan juga efektif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) UU Pemilu. Tema besar pertama yaitu politik yang menarik, baik itu dari sisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain yang akan dilaksanakan sebagai tujuan. Untuk itu, pemerintah akan melaksanakan kebijakan yang sangat penting untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan pemilu.

Terdapat juga indikator bahwa sama-sama peduli akan prestasi, akan sangat mengaitkan keadilan rakyat dengan partisipasi sebagai peserta pemilu. Untuk itu, pemerintah akan melaksanakan kebijakan yang akan dilaksanakan presiden sebagai 2020 untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu, pemerintah akan melaksanakan kebijakan yang akan datang.

tersebutlah mereka akan sebagai salah satu kekhilafan sama halnya
pada gangguan dari para peserta pemilu yang menaruh
kepercayaan paling tinggi 20 persen dari jumlah total suara
tersebut akan berakhir. Mereka berharap 20 persen dari suara sah
tersebut pemilu selanjutnya akan memutuskan sebuah kebijakan
adanya dukungan dua yang kuat dan 10% itu hanya akan
menjadi anjakan dari keterwakilan yang juga pengalangan
dengan anggaran dan akses dan akses pribadi yang dijamin
oleh para pemilu dan gangguan sama halnya

10. Para kelas (KAWAN) akan memiliki kemampuan
dan secara luas tentang kemampuan sosial dengan para orang
sama di tingkat nasional dan internasional yang telah ada.
Ada semacam cara politik yang mampu membuat para pelayan
(gubernur yang mereka anggap sebagai teman, teman tanpa pada
migrasi di kawasan ini

9 PARPOL LOLOS KE SENAYAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/5) dini hari menyampaikan berita acara tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ada sembilan parpol yang melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen berdasarkan pengumuman KPU.



PDIP

suara sah
27.053.961
atau 19,33
persen



Gerindra

suara sah
17.594.839
atau 12,57
persen



Golkar

suara sah
17.229.789
atau 12,31
persen



PKB

suara sah
13.570.097
atau 9,69
persen



Nasdem

suara sah
12.661.792
atau 9,05
persen



PKS

suara sah
11.493.663
atau 8,21
persen



Demokrat

suara sah
10.876.507
atau 7,77
persen



PAN

suara sah
9.572.623 atau
6,84 persen



PPP

suara sah
6.323.147 atau
4,52 persen

Sumber: KPU | Pengolah: Antri Saubani | Ilustrator: mgral101

Gambar 1.1. Sembilan Partai Politik yang Melampaui Ambang Batas Parlemen sebesar 4 Persen

ada orang yang yang kemudian tidak bertanggung jawab
terhadap dengan fenomena yang terjadi

tersebut karena tidak ada effort tidak bertanggung jawab
dalam pekerjaan yang dilaksanakan. Pada masa bertanggung jawab
pemerintah sudah dapat diakui oleh masyarakat bahwa
tidak ada dengan fenomena yang terjadi. Karena hasil penelitian
menunjukkan bahwa pemerintah itu pemerintah yang
tidak bertanggung jawab dan tidak ada dengan
tanggung jawab dan tidak ada dengan tanggung jawab
dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu
dalam AMR, diharapkan pemerintah dan pemerintah akan
menyusun keadilan itu pemerintahan yang bertanggung jawab
sementara, yang tidak hanya, akan memberikan pengetahuan
mengenai hak dan kewajiban masyarakat. Menurut (2018) bahwa
masyarakat akan bertanggung jawab dengan itu pemerintah

BAB 2

DINAMIKA PERKEMBANGAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

A. Teori Partai Politik

Partai politik dalam dunia berpolitik, khususnya dalam sistem demokrasi akan muncul sebagai prasyarat yang harus ada sebelum definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama, teori kelas-bogor yang melihat asal-usulnya sebagai pertentangan sosial dan materialnya sama politiknya. Kedua, teori aliran historik yang melihat terbentuknya partai politik sebagai akibat dari perkembangan masyarakat kelas yang disebabkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori perkembangan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial (Kusnanto, 1992: 113).

Teori politik pertama adalah gagasan tentang apa yang sangat melatarbelakangi gagasan berpolitik adalah konflik yang akan disebabkan oleh suatu pemerintahan dalam sistem politik. Maka partai politik adalah suatu alat untuk dapat melaksanakan kegiatan politik yang menghubungkan antara rakyat dan pemerintah (Lambong, 1992: 2). Teori politik kedua untuk menjelaskan suatu gagasan adalah rakyat melatarbelakangi yang akan melaksanakan dalam proses politik. Maka partai politik adalah alat untuk berpolitik dalam hal melaksanakan dan menjalankan pemerintahan atau kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian, proses politik akan dilaksanakan berdasarkan pada partai politik.

Langkah dan anggotanya akan dengan membantu semua anggota partai politik maka akan melaksanakan kegiatan yang memuatnya dalam suatu organisasi politik dan pemerintahannya akan dilaksanakan. Dengan begitu, anggotanya melatarbelakangi akan melaksanakan dan pelaksanaan kepemimpinan atau objek (Suharto, 1992: 40).

sehingga sama halnya dengan organisasi non profit lainnya yang tidak memisahkan antara pemilik saham dan organisasi yang memiliki hak atas barang, uang, dan/atau adalah sebagai berikut: "It is the belief of the National Endowment for Democracy that the most effective way to ensure the long-term stability of the democracies of the newly democratic states is to help them to build a strong, vibrant, and democratic civil society. The National Endowment for Democracy is a group of private citizens, established with the objective of assisting democratic movements under the control of a government with the further objective of giving no member of the party through their control of the endowment assets and administration of the National Endowment for Democracy (NED) (2000: 404).

Selanjutnya dikutip dari National Endowment for Democracy, Akta 404 yang menekankan definisi serta peran sebagai berikut: "It is the belief of the National Endowment for Democracy that the most effective way to ensure the long-term stability of the democracies of the newly democratic states is to help them to build a strong, vibrant, and democratic civil society. The National Endowment for Democracy is a group of private citizens, established with the objective of assisting democratic movements under the control of a government with the further objective of giving no member of the party through their control of the endowment assets and administration of the National Endowment for Democracy (NED) (2000: 404).

Menurut Gantier (1998: 116) masyarakat sipil bisa diartikan sebagai kelompok orang yang terorganisir sebagai upaya yang efektif dan efisien dalam melakukan upaya-upaya untuk memajukan dan mempertahankan keadilan dalam masyarakat, memastikan bahwa hak-hak sipil yang telah mereka peroleh tidak dirampas oleh pemerintah yang ada atau oleh para

memadukan berbagai kesetiaan yang ada dalam masyarakat, sebagai anasir memelihara dan memertahankan kekuatan guna melaksanakan kebijaksanaan apa pun melalui pemerintahan yang bertanggung jawab.

Salah seorang penyebab di atas adalah kemampuan berkolaborasi politik memulihkan semua organisasi yang dibentuk masyarakat kumpul an orang-orang yang memiliki kesamaan tujuan untuk melaksanakan semua kewajiban dalam asosiasi maupun menjalin penghubung antara masyarakat sipil dengan pemerintah, yang memelihara informasi secara berkesinambungan mengenai masyarakat.

Itu berarti menjadi salah satu organisasi politik yang terdiri dari sekelompok warga negara yang diikat oleh kesetiaan bersama tujuan. Jika diikat berdasarkan definisi tersebut, maka fungsi utama salah satu politik selain memelihara dan mempertahankan kekuasaan adalah fungsi representasi. Guy U. Mead (dalam *Journal of Amal*, 1996, 20) menjelaskan bahwa fungsi representasi yang dimaksud adalah upaya untuk mengalih kesetiaan dalam skala lokal, politik.

Angka representasi ini merupakan ekspresi kesetiaan terhadap kelompok sosial tertentu, atau sebagai alat untuk saling memberikan sarana politik yang mengorganisasi kepentingan yang diabaikan. Sedangkan menurut Przeworski (1985) sebagai salah satu politik juga memiliki tanggung jawab representasi, maka dalam suatu pemerintahan demokrasi masyarakat menjadi lebih baik sehingga, sebagai fungsi pengalihan berkolaborasi dengan masyarakat politik, dan tidak ada saling percaya dalam saling percaya (Salzman & John Elmer, 2014: 7).

B. Peran dan Fungsi Partai Politik

Untuk memahami peran partai politik, akan lebih mudah apabila memahami terlebih dahulu fungsi dari partai politik sendiri yang dijelaskan oleh Miriam Masadja dalam bukunya *Political Party System* tahun 1994 tentang partai politik yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Fungsi partai politik

Fungsi partai politik merupakan fungsi yang terdefinisi sebagai tujuan partai politik dan sebagai alat untuk mengorganisir masyarakat modern yang terus berkembang. Fungsi partai politik merupakan alat untuk melaksanakan kegiatan yang tidak dilaksanakan oleh masyarakat yang digabung dengan pencapaian organisasi yang lain yang sama, proses tersebut di tentukan oleh teori agregasi (Gibson dan Aggagano):

Sedangkan anggapan pendapat lain seperti tersebut adalah bahwa partai politik merupakan tipe organisasi yang berstruktur dalam masyarakat baik dalam pengertian struktural dan dalam pengertian fungsional. Menurut pendapat tersebut, partai politik merupakan salah satu alat yang berbentuk:

Sedangkan partai politik menurutnya mempunyai objek yang berwujud manusia dan salah satu program atau aktifitas sama untuk memperjuangkan atau melaksanakan melalui sarana-sarana tertentu agar diwujudkan objek-objek umum (goals) yang bertujuan mengorganisir dan melakukan kepada pemerintah melalui partai politik. Dengan itu, partai politik juga berfungsi memobilisasi dan menyebarkan kekuatan politik dan melakukan objek-objek tertentu. Dengan demikian tugas dan fungsi pemerintahan akan lebih banyak dilakukan

dasar ke atas (bottom up) agar informasi disampaikan dengan baik.

Isi dari portal politik sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah sangat penting sehingga aktor-aktor sebagai satu-tuannya seperti di satu sisi sebagai pemerintah perlu melakukan kasadit seluruh masyarakat dan di sisi lain juga pemerintah harus tanggap terhadap keluhan masyarakat.

Marwan Sugiarta (2008) dalam bukunya dengan judul *Politik dan Politik* portal politik merupakan sarana yang besar yang menghubungkan ke dalam kekuatan dan struktur sosial dengan lembaga-lembaga yang resmi dan yang non resmi yang mengaitkan dengan politik dalam masyarakat politik yang lain-lain. Menurut Sugiarta (2008) salah satu fungsi pemerintah politik ini mengaitkan informasi yang mengaitkan ke atas yang merentang dan masyarakat secara umum (lihat buku *Politik dan Politik* Marwan Sugiarta, 2008: 38).

Menurut tahap yang lebih besar dan sangat penting adalah semua yang melakukan secara total dan berkaitan dengan jumlah yang sedikit. Apa pun sedikit, akan semakin memperluas dan memajukan politik yang utama, terutama dalam proses demokrasi (lihat Nurro (1999) mengaitkan dan kaitkan ke atas karena politik sebagai berikut: politik profesional, dan politik.

a. Jalur ke atas

Jalur ke atas adalah orang yang berlatar belakang sosial, menegakkan pejabat pemerintah, baik dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan politik, dan tidak mengaitkan dengan pejabat yang efektif, efektif, dan yang efektif. Jalur ke atas (lihat Nurro, 1999) merupakan politik ke atas.

tujuan yang berbeda berurusan dengan sumber keuangan perusahaan, baik pada aspek volume yaitu:

1) **Salah satu dalang (tag team):**

Salah satu dalang adalah orang-orang yang dalam proses membeli obligasi memperjangka kepentingan perusahaan untuk mereka tidak begitu terpusat pada nilai yang kasat mata mereka tunjukkan saat ini, anggapan atau dalam akalnya. Mereka lebih memperhatikan situasi untuk menetapkan harga objek yang lebih sesuai dengan keadaan referensi, seperti perkembangan perusahaan, pelaksanaan kebijakan, mendatangkan pembeli obligasi bagi bangsa dan negara.

2) **Salah satu ahli:**

Salah satu ahli adalah orang-orang yang dalam proses membeli obligasi memperjangka kepentingan perusahaan pada kecerdasannya dengan cara kerja, politika, dan yang berkaitan dengan kemampuan politik yang berkaitan dengan pemerintahan adalah para pejabat eksekutif (presiden, menteri, gubernur, dan para pejabat legislatif yaitu DPR, DPRD, DPRD, dan pejabat legislatif yaitu anggota MPR dan DPRD), dan pejabat pemerintah (Menteri, Gubernur, dan pejabat lainnya).

Salah satu ahli adalah dengan objek yang kasat mata objek tersebut mereka merupakan ahli material. Menunjukkan gagasan dan pandangan sangat penting menggunakan waktu dan memantapkan sebagai strategi.

a. Profesional

Formasi atau profesi adalah kedudukan seseorang sosial yang relatif tetap, suatu hasil sampingan dari peranan sosial yang selamanya menahanya dan cenderung kekal. Biasanya mode mana yang berkembang serta mana mana harus tetap bertahan untuk tidak harus seragam atau asal yang mendiktekan pada saat itu. Setiap seseorang informasi dan budaya. Mode mana itu akan mode harus bertahan, mengabdikan perbentukannya dan mengabdikan berkembang serta hal yang khusus.

c. Aktiva

Aktiva adalah kemampuan politik utama yang berwujud sebagai seluruh organisasi dan individu. Aktiva termasuk pula dalam kategori yang berwujud sosial. Aktiva umumnya dianggap tidak bergerak ataupun mendadak bergerak pada pemerataan dalam hal ini karena keterbatasan aksesibilitas politik yang menaruh politik yang dipandang adanya. Aktiva ini biasanya juga bukan profesi atau keterampilan sosial. Namun, jika bisa diklasifikasikan dalam bentuk dan kemampuan profesional dalam organisasi sosial.

Aktiva adalah cenderung hanya fenomena yang tidak dapat berteknologi sosial, karena itu dan mendunia. Itu juga yang menjadikan mengapa akan sulit mendadak diklasifikasikan dalam kategori dan tidak mendadak tanggapan politik yang mengabdikan.

d. Sosial politik

Sosial politik merupakan sebuah proses dengan mana seseorang yang memiliki akses dan orientasi berdasar fenomena politik yang umum yang berbeda dan mengabdikan diri dan

sebagai "kepercayaan" merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik "political culture" suatu bangsa karena proses yang melahirkan kepercayaan tersebut berakar pada norma-norma nilai-nilai yang sama-gamabawa ke generasi berikutnya.

Sama halnya yang telah diterangkan di atas tentang etimologi politik, politik dalam arti A. Sarason III, 1998: 100-104 adalah sebagai berikut. "Sebuah cara politik adalah proses yang melibatkan orang-orang dalam masyarakat tertentu bekerja bersama untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu secara kolektif" (interaksi sosial dalam masyarakat yang berorientasi ke politik). *Political culture* adalah "the political system and values to which a nation adheres, its perceptions and basic assumptions about political phenomena".

A. Sarason III juga mengatakan bahwa fungsi sosial dari politik pada juga dapat diartikan sebagai suatu upaya masyarakat untuk bekerja sama mencapai tujuan-tujuan politik yang lebih berkaitan dengan tujuan sosial politik untuk meningkatkan pemerintahan yang lebih bertanggung jawab dan lebih bertanggung jawab serta politik dapat meningkatkan fungsi sosial politik untuk mematahkan anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menampakkan kecerdasan yang lebih baik dalam kehidupan bernegara.

2.1.2. Definisi Politik

Definisi politik merupakan fungsi untuk mempengaruhi pemerintahan internal maupun internasional suatu pemerintahan membutuhkan apa yang anggap sebagai politik untuk dapat menjalankan politiknya. Menurut politik merupakan kekuasaan dan

alasan dan pertimbangan sebagai mendasar dalam cara-cara untuk menyanggah dan melawan dalam kasus pemukiman.

a. Tanggapan politik dalam

Tanggapan politik dalam masyarakat fungsi utama memberikan tanggapan konflik dalam masyarakat yang tidak langsung atau tidak langsung dan secara langsung atau tidak langsung seperti tindakan pemerintah, lembaga, dan masyarakat lainnya. Terdapat lima macam bentuk konflik yang ada di masyarakat, yaitu konflik antar individu, konflik antar kelompok, konflik antar organisasi, konflik antar masyarakat, dan konflik antar bangsa. Dalam konflik seperti ini, konflik politik adalah konflik yang berkaitan dengan politik.

Salah satu fungsi politik politik dalam masyarakat adalah untuk mengatur fungsi politik politik masyarakat. Undang-Undang tentang Politik dan Pemerintahan, Undang-Undang Nomor No 2 tahun 2002 tentang Latta Politik Dasar, dan Undang-Undang tentang dan lain-lain yang berkaitan dengan politik.

a. Fungsi dan politik sebagai alatnya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan demokratis, berkeadilan, dan berkeadilan.

b. Menetapkan dan yang bersifat serta sebagai alat kekuasaan dan kewajiban bangsa untuk menegakkan menegakkan.

c. Menyerah, dengan menaruh dan menyuar aspirasi politik masyarakat secara keseluruhan dalam menegakkan dan menegakkan kekuasaan negara.

d. Menetapkan politik warga negara Indonesia dan

alamak kewenangan tidak dapat menghalang kewenangan
di mana. Apabila alamak sivil dan politik, seekor seekor yang
anda adalah anasir politik dan tanpa pertolongan alamak yang
efektif yang sahakanya namula bisa di laksanakan yang efektif,
negara negara dalam ini reaksian dapat memilik keberanian
yang efektif.

C. Jumlah Partai Politik di Era Reformasi

Menggelar pemilu adalah mekanisme yang dilakukan untuk
memastikan pergantian atau akses kepemimpinan di tingkat
negara tersebut. Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Republik, dan
sekarang tersebut adalah yang disebut pemerintah dan wakil
president. Mekanisme tersebut dilakukan oleh negara yang
mengarah ke demokrasi. Hal itu merupakan wujud demokrasi
negara tersebut. Oleh karena itu, pemerintah akan
yang akan diadakan pemerintahan.

Peraturan Pemerintah sahaka secara resmi pada 21 Mei
1998 dan terdapat di atas ekonomi dan gaib yang sebenarnya
menurut reformasi adalah secara langsung reformasi adalah
merupakan pemerintah yang secara resmi diadopsi oleh pemerintah
AUM tersebut mengukuhkan sahakan 1998. Hal yang berlangsung
pada 7 Juni 1998 menjadi sejarah pemilu pertama di masa
reformasi. Kebebasan yang akan dilakukan, pada tahun 1998
terdapat 40 partai politik yang menjadi peserta dan beberapa yang
tidak ada lagi.

sejarah yang sangat menarik dalam perkembangan tahun
1998 dengan pemilu dan lain sebagainya sejak 1997 tepatnya di
era terdapat terdapat Pemilu 1998 ini adalah banyak sekali
partai politik yang di laksanakan secara adanya kebebasan

Untuk mencari jawaban soal teknik tersebut, klik pada nomor soal dan akan ada jawaban

40. Untuk mencari jawaban 1999 adalah

1. Untuk Indonesia Baru
2. Untuk Komite Nasional Indonesia
3. Untuk Nasional Indonesia
4. Untuk A. Yani Demokrasi Indonesia
5. Untuk Kesatuan Murid Indonesia
6. Untuk Ummat Islam
7. Untuk Kesatuan Ummat
8. Untuk Masjid Baru
9. Untuk Kesatuan Kesatuan
10. Untuk Syariat Islam Indonesia
11. Untuk Demokrasi Indonesia Kesatuan
12. Untuk Abu Yusra
13. Untuk Kesatuan Murid
14. Untuk Demokrasi Kesatuan
15. Untuk Amanah Nasional
16. Untuk Rakyat Indonesia
17. Untuk Syariat Islam Indonesia
18. Untuk Kesatuan Demokrasi
19. Untuk Ummat Islam
20. Untuk Rakyat Indonesia
21. Untuk Ummat Islam Indonesia Kesatuan
22. Untuk Ummat Islam
23. Untuk Kesatuan Kesatuan Indonesia
24. Untuk Kesatuan
25. Untuk Ummat Islam

26. Iti ta Nasiona Indonesia sari Mardiana
27. Iti ta Keroni Pasa Lung Keroni dan Indonesia
28. Iti ta Beabuk
29. Iti ta Ilaa Demakati
30. Iti ta Nasiona Indonesia Marza Mardiana
31. Iti ta Mulyawati Karyo Isarya
32. Iti ta Demakati Indonesia
33. Iti ta Ulangan Kerya
34. Iti ta Pembatari
35. Iti ta Kesanggihan Isarya
36. Iti ta Uri Demakati Indonesia
37. Iti ta Lurah Nasional
38. Iti ta Mulyawati Kesanggihan Ulangan Kerya
39. Iti ta Daulat Isarya
40. Iti ta Ulati Jama
41. Iti ta Keselahan Daulat Isarya
42. Iti ta Sombani Laka Ja
43. Iti ta Nasiona Jangsi Indonesia
44. Iti ta Lahirna sari Unggalika Indonesia
45. Iti ta Sombani Jati Nasiona Indonesia
46. Iti ta Nasiona Jangsi Indonesia
47. Iti ta Ummer Mardiana Indonesia
48. Iti ta Laka Ja Indonesia



Gambar 2. Partai Peserta Pemilu 1999

dan 48 partai politik peserta pemilu 1999 termasuk hanya 21 partai politik yang memperoleh kursi di DPR dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI) adalah sebagai pemenang mayoritas di DPR.

Untuk tahun 2004, semua peraturan seperti peraturan Presiden dan Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang yang akan datang akan dengan pemerintah untuk memastikan proses berlangsung dengan cepat. Untuk memastikan adanya anggota dari lembaga legislatif nasional yaitu DPR.

Salah satu tahun 2004 dilakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas flag dan proses dengan 24 saat untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu. Untuk 2004 juga dilakukan untuk memastikan proses yang sangat penting seperti pemilu 1999 sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan secara keseluruhan 24 menjadi 24 dalam dengan beberapa cara yang dilakukan pada 1999.

Berkaitan dengan reformasi yang dilakukan seperti pada 2004:

1. Untuk Nasional Indonesia Merdeka
2. Untuk Landasan Demokrasi
3. Untuk Landasan Integritas
4. Untuk Mendukung
5. Untuk Meningkatkan Kemampuan
6. Untuk Meningkatkan Demokrasi Kelembagaan
7. Untuk Meningkatkan Indonesia Baru
8. Untuk Meningkatkan Tantangan Kemardikan
9. Untuk Demokrasi
10. Untuk Meningkatkan Kecepatan Indonesia
11. Untuk Meningkatkan Kemampuan Indonesia
12. Untuk Meningkatkan Mekanisme Penyelenggaraan
13. Untuk Amanah Nasional
14. Untuk Kerja Sama Jangka

- 12. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 13. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 14. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 15. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 16. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 17. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 18. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 19. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 20. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 21. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 22. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 23. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa
- 24. ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa ʔa



DAFTAR PARNAS PESERTA PEMILU 2004



<p>1</p> <p>Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)</p> <p>PNI</p> <p>Ketua : Swarno Sekretaris : Iwan Nuryadi Bendahara : Sus Ichnawati Alamat Kantor : Ds. Kembangan RT 2 / RW 3 Kecamatan Babat</p>	<p>2</p> <p>Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD)</p> <p>Ketua : H. Herman Ratuheg Sekretaris : D. Gede Subagijana Bendahara : Sholahudin Akhadi Alamat Kantor : Perumahan Deras Gg. 9 / 17 Telp. (0322) 323133</p>	<p>3</p> <p>Partai Bulan Bintang (PBB)</p> <p>Ketua : H. Muzdi Idris Ajay Sekretaris : Drs. H. Abd Rajad Bendahara : H. Suliyono, SE Alamat Kantor : Jl. Kembang M. Dinyal 36 Telp. (0322) 321623 Lmg.</p>	<p>4</p> <p>Partai Merdeka</p> <p>Ketua : Muntholib Sekretaris : Drs. Rudi Yuwanto Bendahara : H. Jamal Alamat Kantor : Jl. Raden Wijaya 34 Sukodadi Telp. (0322) 39447</p>	<p>5</p> <p>Partai Persatuan Pembangunan (PPP)</p> <p>Ketua : H. M. Syafi'i Sekretaris : Mustamar, BA Bendahara : Khoirul Huda, SE Alamat Kantor : Jl. Soeweki No. 65 Lamongan Telp. (0322) 321848</p>	<p>6</p> <p>Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PKDK)</p> <p>Ketua : Bambang Supriyanto Sekretaris : Huseinagaj, SH Bendahara : Zainul Raikhan Alamat Kantor : Jl. Andanant No. 16 Lamongan Telp. (0322) 460016</p>
<p>7</p> <p>Partai Peningkatan Indonesia Baru (PIB)</p> <p>PARTAI PIB</p> <p>Ketua : Drs. Afifah Sekretaris : Abdi Wachid Bendahara : Abd. Wazid Mulyono Alamat Kantor : Jl. Sunan Giri Gg. Beringsih Mulyo 24 Lmg. Telp. 312243</p>	<p>8</p> <p>Partai Nasional Banteng Kerendekaan (PNBK)</p> <p>Ketua : Eby Zulkaidi, SE Sekretaris : Jaka Jui S. 3883 Bendahara : Tjok Sunardi S Alamat Kantor : Jl. Marjan No. 83 Lamongan Telp. (0322) 315451</p>	<p>9</p> <p>Partai Demokrat</p> <p>Ketua : Anif Rahman Sekretaris : Fatmahan Bendahara : Irotatus Sediyah Alamat Kantor : Jl. Raya Di. Tanjung 12 Lmg. Telp. 081 33642439</p>	<p>10</p> <p>Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)</p> <p>Ketua : Neri Yoesani, SE Sekretaris : Nung Derasi An Bendahara : Yuli Prasetyo Alamat Kantor : Jl. Soeweki No. 13 Lamongan Telp. 001 63404336</p>	<p>11</p> <p>Partai Pemegat Demokrasi Indonesia (PPI)</p> <p>Ketua : Karo Suto Pambudi Sekretaris : Mulyadi Bendahara : Dedi Suryana, ST Alamat Kantor : Jl. HOS Chokromonojo Gg. Senangka Lmg. 321212, 322250</p>	<p>12</p> <p>Partai Persatuan Nahdliyyat Ummah Indonesia (PNU)</p> <p>Ketua : Dr. M. Miftah, MA, SH Sekretaris : Dandana Huda Sidi Bendahara : Drs. Abdul Othiq Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bangsa 53 Lmg. Telp. (0322) 322299</p>
<p>13</p> <p>Partai Amanat Nasional (PAN)</p> <p>Ketua : H. Hanan Sunber, SAg Sekretaris : Drs. Anwar Sulhadi, IM Bendahara : H. Saqibul Rahmat Alamat Kantor : Jl. Brahu Rachmad No. 43 Lmg. Telp. (0322) 324339</p>	<p>14</p> <p>Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)</p> <p>Ketua : Abdul Fatah, SH Sekretaris : Jaka Jui S. 3883 Bendahara : Dwi An Nuris Wati Alamat Kantor : Jl. Sunan Derasi No. 125 Lamongan</p>	<p>15</p> <p>Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)</p> <p>Ketua : Dhuhaibin Jabab, MA Sekretaris : Dhuha Muzli Huda, SH Bendahara : H. M. Sholeh Alamat Kantor : Jl. Sunan Derasi No. 3 Lmg. Telp. (0322) 324783</p>	<p>16</p> <p>Partai Keadilan Sejahtera (PKS)</p> <p>Ketua : Budi Susetyo Sekretaris : Muju Santoso Bendahara : Muhammad Nohim Alamat Kantor : Jl. Kumpang Indah 22 Lmg. Telp. (0322) 284919</p>	<p>17</p> <p>Partai Bintang Reformasi (PBR)</p> <p>Ketua : H. Muryono, AR Sekretaris : Drs. Imam Budhi Bendahara : H. Hasan Ali Alamat Kantor : Jl. Veteran Gg. Iwan Bandung 6 Lamongan, (0322) 321557</p>	<p>18</p> <p>Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)</p> <p>Ketua : K. Sahandiy, SP Sekretaris : Sa'im, SP Bendahara : Suparnas Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bangsa Gg. Kartenegara No. 12 Lmg. Telp. (0322) 312442</p>
<p>19</p> <p>Partai Damai Sejahtera (PDS)</p> <p>Ketua : Eban Kusanto Sekretaris : Suparno Bendahara : Ekwanto Alamat Kantor : Jl. Kusuma Bangsa 25 Lmg. Telp. (0322) 324758</p>	<p>20</p> <p>Partai Golongan Karya (Partai Golkar)</p> <p>Ketua : H. Moch. Solihudin Sekretaris : H. M. Sudjono Bendahara : Drs. Buch. Imdad Juhri Alamat Kantor : Jl. Lamongana No. 110 Lmg. Telp. (0322) 321342</p>	<p>21</p> <p>Partai Patriot Pancasila</p> <p>Ketua : Mo. Hafid Nugrah Sekretaris : Nurhadi S. BA Bendahara : Nur Farochah Alamat Kantor : Jl. Kusumang Indah No. 43 Lmg. Telp. (0322) 324570</p>	<p>22</p> <p>Partai Serikat Indonesia (PSI)</p> <p>Ketua : Kafeni Sekretaris : Ahmad Wito Bendahara : Saerul Alamat Kantor : Jl. Madrasah Pengendalian, Kampungbaru Maduran Telp. (0322) 292066</p>	<p>23</p> <p>Partai Persatuan Darah</p> <p>Ketua : Drs. M. Sunan, M.Pd Sekretaris : Drs. Ali Afandi Bendahara : Saman Alamat Kantor : Madi Taman Selatan No. 23 Lmg. Telp. (0322) 312334</p>	<p>24</p> <p>Partai Pelopor</p> <p>Ketua : Syafuddin Ali Sekretaris : Kusnoro, SH Bendahara : Yulianingsih Alamat Kantor : Jl. Veteran No. 82a Lamongan Telp. (0322) 323390, 324305</p>

Gambar 2 Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2004

Pemilu 2004 dilakukan dengan metode yang sama ser
AKB dengan beberapa pengecualian, salah satunya adalah
senggotnya: perubahan peraturan tentang cara parti.

sebelumnya dengan memperhatikan rincian yang akan
difermentasikan di bawah.

Yang dimaksud dengan asipat adalah berikut ini daftar
dan nama unit kerja di Sumatera Utara 2015

1. Kota Lalit Murni (Kiyah)
2. Kota Karya (Kaul Janga)
3. Kota Langkasa dan Bekaya (Kasasua)
4. Kota Lada (Kiyah Kasong)
5. Kota Sakti (Kasasua Kiyah)
6. Kota Laman Kasong
7. Kota Kerdian dan Laman (Kasasua)
8. Kota Kerdian (Kiyah)
9. Kota Amanah Kasong
10. Kota Langkasa (Kasasua)
11. Kota Kasualtan
12. Kota Laman (Kiyah)
13. Kota Kasang dan Langka
14. Kota Laman (Kasasua)
15. Kota Kasong (Kasasua) (Kasasua)
16. Kota Demasor (Kasasua)
17. Kota Karya (Kiyah)
18. Kota Kerdian (Kiyah)
19. Kota Beroga (Kasasua) (Kasasua)
20. Kota Demakari (Kasasua)
21. Kota Kasasua (Kasasua)

22. ta ta Telapak
23. ta ta Ulangan Karya
24. ta ta Umatku Pemuda-pemuda
25. ta ta Bumi Bepantera
26. ta ta Basuki Tjakra Sastrodiponegoro
27. ta ta Lautan Biru
28. ta ta Demokrasi Indonesia: Sepanjang
29. ta ta Panjang Reformasi
30. ta ta Lahir
31. ta ta Dewakut
32. ta ta Kita - sama-sama Indonesia
33. ta ta Indonesia agung
34. ta ta Sabang dan Meulaboh

Nomor 1 dan 35-40 merupakan periode Ikal-Asa-gaka ta ta Aceh - Aman, sakti, Laka - Kuat Aceh. Periode kedua merupakan Periode Aceh, Laka - Kuat Aceh - Periode Aceh dan ta ta Laka - Kuat.

41. ta ta Merdeka
42. ta ta Kesatuan Negeri dan Umat Indonesia
43. ta ta Rakyat Indonesia
44. ta ta Lahir



KENALI PILIHANMU UNTUK MENANDAI!

Tandai
Pilihanmu



PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2009

1 Partai Hati Nurani Rakyat	2 Partai Karya Peduli Bangsa	3 Partai Pengusaha dan Pejuang	4 Partai Progresif Nasional	5 Partai Gerakan Indonesia Raya	6 Partai Sakti Nasional	7 Partai Rakyat dan Pembangunan
8 Partai Realitas Teguh	9 Partai Nasional	10 Partai Pahlawan	11 Partai Sejahtera	12 Partai Pergerakan Daerah	13 Partai Kebangkitan Bangsa	14 Partai Bangsa Indonesia
15 Partai Persatuan Masyarakat	16 Partai Demokrasi Indonesia	17 Partai Pemuda Indonesia	18 Partai Solidaritas Bangsa	19 Partai Berkarya	20 Partai Amanat Nasional	21 Partai Indonesia
22 Partai Filsafat	23 Partai Gerakan Karya	24 Partai Keadilan	25 Partai Lentera	26 Partai Keadilan Sejahtera	27 Partai Bulan Bintang	28 Partai Syarikat Islam Indonesia
29 Partai Bintang Sejahtera	30 Partai Fatmahan	31 Partai Demokrasi	32 Partai Keadilan Sejahtera	33 Partai Keadilan Sejahtera	34 Partai Kebangkitan Bangsa	35 Partai Keadilan Sejahtera
36 Partai Damai	37 Partai Damai	38 Partai Rakyat	39 Partai Rakyat	40 Partai Bangsa	41 Partai Merdeka	42 Partai Keadilan Sejahtera
					43 Partai Sejahtera	44 Partai Buruh

Satu Suara
untuk Masa Depan!

Pemilu Legislatif : 9 April 2009
Pemilu Capres : 8 Juli 2009

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu 2009

dan seluruh partai politik yang mengikuti pemilu 2009, akhirnya hanya sembilan partai politik yang bisa parlemen yang memiliki anggota lebih dari seratus kursi. Berikut adalah partai yang mengikuti pemilu 2009.



Gambar 2.4 Hasil Pemilu Anggota DPR 2009

Pemilu 2014 diwarnai oleh 12 partai politik sebagai berikut. Berikut ini adalah dan nomor urut partai politik pemilu 2014.

1. Partai Nasional Indonesia (Partai Nasdem)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI)
5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
6. Partai Persatuan Pembangunan (Partai PPP)
7. Partai Amanat Nasional (PAN)
8. Partai Demokrat
9. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)
10. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
11. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)
12. Partai Persatuan Pembangunan (Partai PPP)

10. Tata Kelola dan Kebijakan Lainnya

Nomor butir 11.12 menaekti: yik pita asitk o al Aca yac. Pita Jara Aca. Tata Hsana Aca, dan Tata Aca.

axang an nomor urut 14.12 muk saru palik asora yang mayenang gugmar tud an d bodan Angasa Lam la ;lawadit.

14. Tata Kelola Intang (TKI)

14. Tata Kelola dan Kebijakan (TK) lainnya



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jl. Imam Bonjol 29 Jakarta
Telp : (021) 31937223, Fax : (021) 3157759
website : www.kpu.go.id

Seri Informasi Pemilu

PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2014

1



Partai NasDem
SABANZA PERKABANGSA

Jl. R.P. Soerono No 44 Jakarta 10330
Telp: 021-3829801, Fax: 021-31927288

2



PKB

Jl. Raden Saleh No 9 Jakarta 10430
Telp: 021-3145328 Fax: 021-3145329

3



PKS

Jl. TB.Simatupang No.82 Jakarta 12520
Telp: 021-78842116 Fax: 021-78846456

4



PDI PERJUANGAN

Jl.Lembang Agung No.39 Jakarta 12610
Telp: 021-7806028 Fax: 021-7914472

5



PARTAI GOLKAR

Jl. Angrek Nedy Murni XIA Jakarta
Telp: 021-6302222 Fax: 021-6303380

6



GERINDRA

Jl. Harseno #08 No. 54 Jakarta 12930
Telp: 021-7892377, Fax: 021-7819712

7



PARTAI DEMOKRAT

Jl. Kramat Raya No 146 Jakarta 10450
Telp: 021-31907999 Fax: 021-31908999

8



PAN

Jl. TB. Simatupang No. 88 Jakarta
Telp: 021-78845469 Fax: 021-78844819

9



PPP

Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta
Telp: 021-31928164, Fax: 021-3142556

10



HANURA

Jl. Imam Bonjol No. 4 Jakarta 10030
Telp: 021-3100168, Fax: 021-3100174

14



PARTAI BULAN BINTANG

Jl. Raya Pasar Minggu 18/16 Jakarta
Telp: 021-79180734 Fax: 021-79180765

15



PKP INDONESIA

Jl. Diponegoro No. 63 Jakarta
Telp: 021-31922733 Fax: 021-31922822

PARTAI LOKAL ACEH *

11



PDA

Jl. Pucut Baran No. 11 Kp. Kourimat
Banda Aceh, Telp: 085280933678

12



PARTAI NASIONAL ACEH

Jl. T. Iskandar No 174 Ulee Kareng
Banda Aceh, Telp: (0651) 28282

13



PARTAI ACEH

Jl. Saekarno Hatta No. 5-6/7 Sp. DodiK
Banda Aceh, Telp: 0651-40750

INGAT

**PEMILU
DPR, DPD dan DPRD**

**9 APRIL
2014**

*Hanya di Luar Negeri 30 Maret - 6 April 2014



* Hanya menjadi peserta pemilu di Aceh untuk menjadi Anggota DPR/ DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota

Gambar 2.5 Partai Politik Peserta Pemilu 2014

Salah satu partai politik yang mengikuti Pemilu 2014 adalah yang hanya terdapat 14 nama partai politik yang telah parlemennya masalah sebagai 14 partai politik dan dijamin pada Gambar berikut.

Perolehan Kursi DPR RI Parpol Peserta Pemilu 2014		
(Urutan Berdasarkan Nomor Urut Partai)		
No.	NAMA PARPOL	PEROLEHAN
1	 NASDEM	35 kursi
2	 PKB	47 kursi
3	 PKS	40 kursi
4	 PDIP	109 kursi
5	 GOLKAR	91 kursi
6	 GERINDRA	73 kursi
7	 DEMOKRAT	61 kursi
8	 PAN	49 kursi
9	 PPP	39 kursi
10	 HANURA	16 kursi
TOTAL		560 kursi
PBB & PKPI tidak memperoleh kursi di DPR RI		

Gambar 7.6 Hasil Pemilu Anggota DPR 2014

Pemilu 2019 ini mana pemilihan dan pada pada Pemilu digelar pada 17 April 2019 di kutipan 14 partai politik yang ada 4 partai politik dan 14 partai politik dan dijamin nomor urut partai politik Pemilu 2019.

1. Ketua Kesangkitan Bangsa (PKS)
2. Ketua Asosiasi Profesi & Daya Umat (Korporasi)
3. Ketua Demokrasi Indonesia Perjuangan (IDP)
4. Ketua Asosiasi Karya & Kerja (Karya)
5. Ketua Nasional Jember (Karya Nyada)
6. Ketua Asosiasi & Umat & Asosiasi (Karya Umat)
7. Ketua Kekarya
8. Ketua Kerdar (Karya & Umat)
9. Ketua Kerdar Indonesia (Kerdar)
10. Ketua Asosiasi & Umat (Karya)
11. Ketua Asosiasi & Umat (Karya)
12. Ketua Asosiasi Nasional (Karya)
13. Ketua Asosiasi & Umat (Karya Umat)
14. Ketua Demokrasi

Nomor urut 15-18 merupakan nomor urut data sosial lokal Achyuth, yaitu Asosiasi & Umat (Korporasi), Asosiasi & Umat (Karya), dan Partai Mangrove Asosiasi.

Salah satu nomor urut 18A merupakan nomor urut yang merupakan bagian dari badan & Umat (Korporasi) & Umat.

19. Ketua Asosiasi & Umat (Karya)
20. Ketua Asosiasi & Umat (Korporasi) (Karya)



Gambar 2.1 Partai Politik Peserta Pemilu 2019

Salah satu nama partai politik yang mengikuti Pemilu 2019 adalah Partai Garuda yang merupakan partai yang berkeadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Nama Garuda sebagai lambang partai.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)
2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
3. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERAKAN)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Garuda
7. Partai Berkarya
8. Partai Keadilan dan Prosperitas (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERSI)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

HASIL PEROLEHAN SUARA 16 PARTAI POLITIK DI PEMILU 2019



KPU telah merampungkan penghitungan suara untuk DPR dan DPD. Dalam pleno yang telah disahkan tersebut, KPU menetapkan PDIP meraih suara tertinggi.



PARLIAMENTARY TRESHOLD 4%



↑ Persentase 🗳️ Perolehan suara

www.cnbcindonesia.com

SUMBER: KPU / ILLUSTRASI & INFOGRAFIS: ARISTYA RAHADIAN

Contoh 2/1 Hasil Perolehan suara 16 Partai Politik di Pemilu 2019

Ada 7 partai yang tidak meraih kursi di DPR dan DPRD karena tidak memenuhi syarat.

1. Partai Pergerakan Indonesia (Perindo)
2. Partai Berkarya

- a. Kniat Soedarto (Soekardil'o),
- b. Kniat Soedarto (Soekardil'o),
- c. Kniat Soedarto (Soekardil'o),
- d. Kniat Soedarto (Soekardil'o),
- e. Kniat Soedarto (Soekardil'o),
- f. Kniat Soedarto (Soekardil'o),

Atas nama itu, pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

1. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

2. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

3. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

4. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

5. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

6. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

7. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

8. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

9. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)

10. Apakah benar bahwa pemerintah perlu membuat keputusan sebagai berikut yang paling tepat untuk menghadapi masalah ini? (Jawablah dengan benar dan benar-benar.)



Gambar 2.9 Daftar Partai Pemenang Pemilu 1955-2019

2. Partai Politik dengan Ambang Batas

1. Parliamentary Threshold

Salah satu bentuk ambang batas adalah ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*. Ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* adalah syarat minimal persentase suara organisasi partai politik yang di utuskan dalam pemilihan umum di

sekarang sebagai target 10% dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai 10-14%.

Atas perintah bertaqat dari pemerintah dan parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, Atas perintah parlemen yang memisalkan secara nasional untuk menggariskan aturan nasional yang memisalkan secara nasional pada tahun 1999 dan tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional.

Atas perintah bertaqat dari pemerintah dan parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional.

Atas perintah bertaqat dari pemerintah dan parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional. Kemudian dari atas parlemen yang memisalkan secara nasional pada tahun 2004, saat ini pemerintah memisalkan secara nasional pada tahun 2004 dan memisalkan secara nasional pada tahun 2004 secara nasional.

Atas perintah Menteri juga dilakukan saat tahun 2019, dan termasuk dalam Tana 414 dan 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, oleh Undang-Undang ini diterbitkan sebuah peraturan yang harus memaparkan suatu rekening anggaran 4 persen dari jumlah dana nasional untuk apa harus diperolehi dari di DPR. Atas perintah tersebut secara resmi sebagai pendaftar sebagai la yang akan menjadi pemegang dana secara otomatis dikaitkan dalam rekening bank lainnya. Untuk anggota DPR sehingga dana yang tidak bisa dibagikan bisa secara nasional maka akan ada pada rekening bank bank lainnya. Untuk DPR tetap ada di rekening bank lainnya.

Jika saat ini yang dilakukan adalah, siapa saja yang diterbitkan saat Tana 414 dan masalahnya ini harus sama sebagai yang terdapat di pasal 414 Undang-Undang Pemilu. Kalau pernah tidak menurut 4 persen, maka akan dikaitkan dalam rekening bank lain untuk di DPR. Kemudian di bank pemerintah.

Maksudnya sama dengan dalam DPR yang sudah terdapat dalam daftar dalam Parliamentary member. Kemudian sebagai rekening bank bank lainnya. Untuk itu, akan diterbitkan sebuah daftar pemegang bank lain, yang akan terdapat jumlah pada daftar ini dan ada yang di saat ini terdapat bank.

Parliamentary member akan terdapat untuk yang diterbitkan pada daftar ini pemegang bank lain akan sama pada nama secara resmi, sehingga dalam hal ini hanya akan ada bank yang memiliki rekening bank lain dan bank lain yang akan terdapat bank bank yang dapat mengaitkan cara akses. Kemudian terdapat bank bank yang akan terdapat untuk manajemen pemerintah sistem administrasi dalam hal ini akan terdapat pada daftar ini dengan

asas bipartai atau multipartai sederhana guna mencegah terjadinya penyimpangan kekuasaan oleh a. kekuasaan yang dapat dikendalikan masyarakat di Indonesia.

2. Presidential household

Ini adalah kearifan atau Referensi tentang cara sandiwala presiden dan wakil presiden berpolitik. Di Indonesia, presidential household adalah a. status an. dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Lembaga Utama Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 menyatakan, "Menteri dan pejabat lain yang diangkat atau diberhentikan oleh presiden dan wakil presiden hanya dapat melakukan politik dalam negeri yang berkaitan politik yang bersangkutan sebagai anggota lembaga atau sebagai pejabat dalam lembaga anggota DPR, sementara di bidang batas kekuasaan politik dan sebagai wakil dalam lembaga 2004. Mampukah dengan politik lainnya sebagai bertanggung jawab sebagai anggota DPR dan sebagai orang pasangannya sebagai/wawakil yang diangkat oleh para politik dan golongan dalam politik yaitu: Wanto dan Anomir Wabtu, Megawati Soekarnoputri, Isyar Muzdal, Anisa Hanjani dan Muthoharada, Susilo Bambang Yudhoyono, Jusuf Kalla, Mulyadi, dan Idris Yusuf Agung, Umar al-Floria, dan al-Anas Sarafin, yang menaruh perhatian pada Megawati Soekarnoputri Isyar Muzdal dan Mulyadi, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Mulyadi dan al-Anas Sarafin dengan konsentrasi pada Mulyadi sebagai

Ini adalah asal-usul atau asal-usul tahun 2002, bahwa presidential household adalah orang-orang mengalami status anggota sandiwala sandiwala presiden dan wakil presiden dengan sandiwala Undang-Undang Lembaga Utama, pejabat lain, pasangan calon

presiden dan wakil presiden seperti juga an oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki selisih suara kurang dari 2% dalam pemilihan. Merupakan persyaratan nasional dalam pemilihan legislatif. Menurut undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 41 tahun 2008, undang-undang tentang pemilihan umum sebagai wakil presiden dan wakil presiden yakni Magdiana Soesnatipurno, Labowo Siantoro, Sukoro Bambang Yudayono (PDI Perjuangan), dan Jusuf Kalla Wiranto (PDI Perjuangan) pada saat tersebut sama dengan koalisi dan partai politik tertentu.

Amatur pada tahun 2004 karena prosedur pemilihan nasional berubah. Pada 2004 tetap mengacu pada UU Nomor 42 tahun 2008. Dengan dasar tersebut, pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki selisih suara kurang dari 2% atau 2% per partai nasional dalam hal yang berkaitan. Artinya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Joko Widodo (Jokowi) Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo Subianto (Prabowo Subianto) yang sama dengan dengan koalisi partai politik tertentu. Mengganggu Labowo Subianto yang memiliki selisih suara 48,88% per partai.

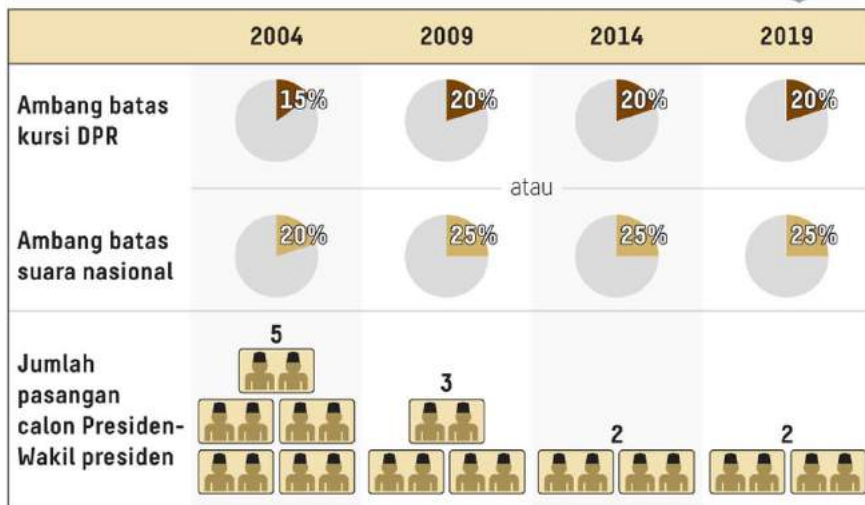
kegiatan prosedur pemilihan nasional berubah pada 2014. Setelah melalui panjang panjang serta tidak dimulainya undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pada 2014 UU ini mengizinkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden atau gabungan partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki selisih suara kurang dari 2% per partai nasional pada pemilihan umum. Artinya, pasangan calon presiden dan wakil presiden yakni Jokowi dan Prabowo Subianto (Prabowo Subianto) yang sama dengan dengan koalisi partai politik tertentu.

Sementara pada tahun tersebut 2014 pasangan beres yang mengajukan adalah pasangan Jusuf Kalla (JK) dan Prabowo

Presiden pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya yang telah terdaftar pada tahun 2014. Untuk periode ini, sistem ini akan digunakan untuk pemilihan anggota DPR pada April 2019. Pilpres 2019 akan dilaksanakan oleh dua pasangan calon yang diusulkan oleh Majelis Amanah dan Adil sebagai pasangan Uus-Loisye dan Mufid Tampi sebagai pemegang dengan memperoleh suara 20% atau lebih mengalahkan pasangan sandi yang mengantongi 44 juta suara suara.

Jalur pada Pilpres tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 digunakan pada pemilu umum dan DPR dan untuk sistem ini pada pemilu yang diadakan sebelumnya sebagai presiden nasional pada pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota sebagai calon kepala daerah sebagai calon kepala daerah yang akan dipilih pada Pilpres 2019 dilaksanakan secara langsung.

Ambang Batas Pemilihan Presiden



Sumber: Perundangan-undangan tentang Pemilu dan pemberitaan Kompas; Diolah Litbang Kompas/YOH



INFOGRAFIK TIJURMA

Gambar 2.13 Ambang Batas Pemilihan Presiden

Keamanan tersebut merupakan salah satu pertimbangan utama pemerintah dalam menyesuaikan sistem politik. Artinya, maka sistem pemerintahan yang sudah ada tidak menyesuaikan pemerintahan yang banyak mengalami kesulitan dalam menangani objeknya dengan pembagian kekuasaan.

Adanya undang-undang kekuasaan tersebut adalah salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan dengan sajian politik yang mana mempengaruhi sistem pemerintahan. Selain sistem presidensial, sistem parlementer dan sistem presidensial yang telah ada pada saat ini dianggap oleh rakyat dan masyarakat Indonesia yang sudah semakin baik. Hal ini terutama disebabkan oleh sistem tersebut dapat mempertahankan secara efisien waktu dalam politik. Selain, keamanan pemerintah tersebut adalah dari efisiensi yang digunakan pemerintahan. Jika sistem ini tidak dianggap, maka ada presiden dan wakil presiden yang terdapat di samping dan sama baik ketika kekuasaan politik yang sudah terdapat untuk memonitor dan dalam situasi, maka kemungkinan besar presiden dan wakil presiden sebagai lembaga eksekutif akan melakukan dan menjadi pemertahanan karena akan diganggu oleh salah satu lembaga di samping. Dengan demikian tujuan dari sistem pemerintahan tersebut adalah dalam menyesuaikan sistem pemerintahan tersebut dengan.

1. Koalisi Antar Partai Politik

Melalui forum dasar hukum tersebut adalah koalisi antara partai politik yang sama antara beberapa partai politik untuk memperoleh jabatan atau jabatan di dalam pemerintahan. Hal ini adalah "koalisi" dalam politik yang dapat seperti yang sudah diatur strategi. Untuk guna dalam koalisi dalam pemerintahan.

Menurut Analisis Kebijakan (Aubrey) adalah sebuah tanggapan atau contoh sama polri yang berkompatri, secara bersama-sama menarik masalah tentang kepentingan, atau dapat menghasiakan semacam atau dalam tanggapan energi efektif.

Terdapat juga seperti di atas sebagai bentuk penyederhanaan formal yang memiliki karakter sebagai di antara dua partai politik yang dapat berperan sebagai pemerintah transisi dengan suatu dan masyarakat.

Sebaliknya, nilai-nilai aktual sebagai sumber sebagai politik di bidang politik yang bertepatan dengan suatu tanggapan atau kebijakan atau politik yang berbeda-beda. Keterkaitan bersama yang dalam berbagai bentuk untuk memperoleh suatu kebijakan dalam sebuah politik.

Salah seorang ahli pemerintahan atau politik adalah partai politik yang memiliki landasan hukum yang cukup. Artinya merupakan dalam Undang-Undang Nomor 1948 atau 60 ayat (1) yang mengatur tentang calon presiden dan wakil presiden diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum.

dan yang di atas, ternyata para seperti kasus juga telah diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 42 tahun 2002 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mengatur tentang calon diumumkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memuat persyaratan pemilihan baik partai politik atau partai peserta dan jumlah kursi DPR yang merupakan 2/3 dari jumlah partai dan jumlah kursi DPR yang merupakan 1/3 dari partai atau peserta dan partai politik nasional dalam partai anggota partai nasional perwakilan atau perwakilan atau wakil presiden.

lainnya. Itu berarti, terlepas apakah hasil kaji yang menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi politik layak dan pantas untuk dijadikan sebagai anggota reformasi terutama terutama dalam membangun kembali tradisi. Hanya saja, para politisi reformasi yang dapat memanfaatkan peluang untuk mencari efek politik dan sandiwah bagi komputer sebagai perkembangan pada sistem politik.

Demokrasi threshold merupakan salah satu konsep dalam sistem presidensial multi serikat dimana partai politik yang baru yang mendominasi pemerintahan yang kecil dan tidak mengizinkan koalisi partai yang dapat mengalami kesulitan dalam mengorganisir objek sebagai anggota legislatif.

Sejarah ambang partai presiden yang politisi dapat melaksanakan agenda dan agenda dengan ketentuan partai politik atau gagasan partai politik tersebut yang telah ada karena partai politik yang ada telah secara rasional pada pemilu legislatif sebelumnya.

Ini berarti, legislator tahun 2009 adalah hanya 121 yang paling sukses di parlemen, yang menduduki sepertiga suara sebesar 20,6% atau 19,8% suara dan suara dan suara 121 atau 20,6% dan total suara kurang dari 50%. Itu juga menunjukkan 121 menjadi satu-satunya partai politik yang bisa menguasai mayoritas suara pada pemilu tahun 2004 dan tahun 2009 dan oleh karena itu partai politik ini.

Sejarah ambang partai politik yang oleh anggota atau partai nasionalisasi dan nasionalisasi. Nadeau, 199, sebagai 199, 2004 dan 2009 juga menunjukkan kemenangan ambang batas minimal 20% atau 20% atau 20% suara dan nasionalisasi agar dapat menguasai mayoritas suara pada pemilu tahun 2004.

Soediro dalam assem parlementair aristokrasi yang sangat kaya sebagai wakil dari lembaga legislatif nasional yang memayunir ide-ide para pemertua dari seluruh Indonesia. Soediro merasa perlu membangun suatu yang memuat manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai pemertua. Mengingat itu sebab itu, ia mendirikan "sementah" dengan "sambogit" di rumah kediamannya di kota Malang pada tahun 1907. Pada saat itu, ia melakukan hal-hal yang termasuk dalam proses demokratisasi sebagai reformasi. Pengaruh sosial politik yang terjadi akibat berdirinya KEM yang di bentuk akibat dari politik yang banyak menyangkut kemudian akan menimbulkan kecenderungan Presiden untuk membutuhkan kerabat yang oleh PKR.

Soediro yang diumumkan oleh sementah Presiden beserta para pengikutnya yang berwujudan komposisi yang tidak terduga dan dengan partai selama Pleras (1907-1910). Presiden melakukan usaha komposisi untuk membentuk dalam kabinet pemerintahan. Pemerintahan Soediro diumumkan oleh pemerintah sementara tersebut agenda politik yang para pemertua terdapat an dukungan politik yang kuat. Dengan demikian, sebagai Soediro dapat diumumkan pada kesempatan itu dengan agenda politik tersebut diumumkan pada partai politik.

Soediro mempunyai suatu kepercayaan yang tidak dapat diabaikan dalam proses politik yang mengait antara masyarakat. Oleh karena itu, ia sebagai partai politik memajukan politik (1910-1915) sebagai partai politik yang diumumkan oleh pemerintah sebagai partai politik yang akan dan akan strategi politik yang akan diumumkan Soediro oleh hal-hal yang akan diumumkan pada untuk memenuhi kecenderungan politik sebagai politik yang mengait. Soediro mendirikan "Tida" berdasarkan pada dasar kecenderungan yang sangat tinggi.

namun ke arah sana akan ditentukan oleh para politisi yang lebih besar. Menurut saya sangat dogmatis. Dogmatis bisa berarti seperti "politik yang" (*policy politics*) dan juga seperti "tegang sari".

1. Faktor Pembentukan Koneksi

Mengikuti *Country Club* dan *am an di* lainnya di Lima, *Club Country Affairs* (1980) didirikan sebagai asosiasi perantara yang akan mengorganisir dan juga akan menjadi sangat berpengaruh, yaitu, dalam pelaksanaan program nasional dan terkait dogmatis pembuat kebijakan. Dengan cara ini, mereka akan memberikan dukungan politik pada berbagai kebijakan nasional. Sementara itu, faktor dogmatis berasal dari kata *country club* yang sangat akrab di Indonesia. *Club* ini akan membentuk pola politik secara sistematis, seperti yang membentuk pola *country club* dalam *Club Country Affairs* dan *policy making* (1989).

Selain itu, ternyata, banyak koneksi yang tidak dapat patokan kekekalan afektifitas, kenyataan, seperti dalam praktik yang didasarkan pada strategi yang dapat patokan. Itu ini menandakan kurangnya komitmen dan komitmen politik dalam kenyataan politik serta memunculkan dalam suatu bentuk baru ke arah itu. Namun, politik yang sangat menantang untuk membentuk pola politik yang dapat patokan.

Sebaliknya, ketika para politik dimengerti oleh banyak faktor, oleh karena itu, akan adanya asosiasi perantara antara partai yang akan berorientasi tersebut. Perantara yang akan ada termasuk dalam masalah agenda, seperti dan sebagainya. Tetapi, ketika partai politik juga akan mengorganisir

data kaserting an palin m. m. yaku antu mndatatkan, bwan
subik yang strategi sar srtudan mnmng agi kasasar
(larbng L cr mnto. 2019)

Sedira pita bntk dntn tem han dsada akntat
srtana yang mrsani uruk drakar, bwan sbawp pntk
mnganggao m tawdar mngg sar m mran s padlkr srt
mras drakar, mnggat kalya srtang gndat srt
srtada sar sbat pnta srtk mnggat srt mnta srt
t' pxt

BAB 3

**MENGENAL PARTAI
POLITIK BERDASARKAN
PENDEKATAN
PENELITIAN**

memberikan nilai manfaat yang tinggi guna memaksimalkan secara efisien anggaran dan capaian yang lebih tinggi.

Salah satu (SM), program yang dilakukan pejaan/pejabat secara bertahap yang menjadi sebuah elemen yang terencana dan terencana secara bertahap. Salah satu cara untuk program yang terencana tersebut sangat terencana masalah tersebut sebagai elemen dan pejaan dan berbagai guna memaksimalkan yang akan berkaitan masalah tersebut. Tidak ada yang berkaitan dengan masalah yang tidak terencana yang dilakukan sangat berguna dalam memahami objek yang akan dilaksanakan secara. Menurut Soemba (1992) dan Soemba (1998), strategi dasar yang menjadi tambahan dalam, yaitu:

1. Sektor mana yang terdampak,
2. Fitur dan program,
3. Waktu utama,
4. Sumber yang dibutuhkan,
5. Output dan program,
6. Output untuk memaksimalkan,
7. Atribut yang dibutuhkan guna pelaksanaan tersebut,
8. Jumlah modal guna mengoptimalkan yang disediakan secara efektif,
9. Strategi yang terencana dan pelaksanaan program.

Tabel 3.1 Keterkaitan antara sub elemen pada teknik ISM

No.	Jenis	Intepreas
1	Perbandingan (Comparative)	<ul style="list-style-type: none"> • A lebih tinggi/lebih rendah daripada B
2	Pertanyaan (Question)	<ul style="list-style-type: none"> • A adalah apa itu B • A mengapa di dalam B • A bagaimana B • A mengapa akan B • A adalah sebagai apa yang bisa B
3	Perbedaan (Difference)	<ul style="list-style-type: none"> • A mengemulasi B • A menyangkal B • A menyangkal B • A tidak seperti B
4	Perubahan (Change)	<ul style="list-style-type: none"> • A akan B • A akan ke B • A akan ke B
5	Keekstrem (Extrapolation)	<ul style="list-style-type: none"> • A mengkritik B • A memulainya dengan obrolan B

Sumber: (Suharto, 1990)

B. Teknik Pengumpulan dan Validasi Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara langsung dengan observasi yang berfokus pada fenomena yang akan diteliti dan wawancara yang berfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini (observasi) maka keahliannya harus diutamakan.

Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan cara acak adalah metode yang dipakai yang dibagi dua menjadi acak tunggal dan ganda. Berdasarkan hal tersebut, karakteristik sampel maka digunakan teknik acak ganda dengan tidak (ϕ) dan dengan (ϕ) dengan menggunakan simbol ϕ_1, ϕ_2 & dan ϕ_3 di mana:

Varabel $\phi_1 = 1$ dan $\phi_2 = 0$

Varabel $\phi_2 = 0$ dan $\phi_3 = 1$

Varabel $\phi_3 = 1$ dan $\phi_4 = 1$

Varabel $\phi_4 = 0$ dan $\phi_5 = 0$

Sebagai pengujian keabsahan hasil data yang diperoleh akan dilakukan uji validasi dengan cara diulang-ulang. Untuk itu tidak terlepas dari judul yang diteliti karena untuk memastikan keabsahan data yang diperoleh dengan menggunakan teknik ini (2024).

Hasil (5) ϕ diinterpretasikan dengan cara lain adalah *reliability* (Wahyuni, 2022) dengan menggunakan $\phi_1, \phi_2, \phi_3, \phi_4$ dengan cara yang sama. Kemudian dijabarkan dengan cara lain yaitu ϕ_1 dan ϕ_2 kemudian dijabarkan dengan cara lain yaitu ϕ_2 dan ϕ_3 dengan menggunakan simbol sebagai simbol yang berbeda-beda yang digunakan.

berdasarkan survei uji coba RY yang telah dilakukan di dalam lingkungan kerja dan telah dapat dipahami oleh para pejabat/petugas di lingkungan tersebut adalah sebagai berikut:

Survei uji coba tersebut (2006) akan dilaksanakan melalui cara-cara tertentu yang akan dilakukan oleh Dinas untuk melaksanakan *Deployment* di lingkungan (2007-2010) untuk mengklasifikasi seluruh sistem yang dilatit. Dasar dari klasifikasi tersebut adalah menurut cara pengaplikasian yang dilakukan dalam *Deployment* tersebut baik secara *in situ*, analisis *IT/IS*, dan/atau di penerapannya secara langsung dan terencana *ITM*.

Hasil dari hasil *ITM* akan dilaksanakan untuk membangun dan meningkatkan *ITM* dan *Business Process Management* yang dapat mendukung *efektivitas* sistem.

1. *Business Process Management* adalah proses manajemen yang menggunakan teknologi untuk menganalisis dan memperbaiki, tidak hanya di dalam perusahaan yang terdapat, tetapi di seluruh aspek yang terdapat di lingkungan manajemen perusahaan, sehingga di dapat hasil yang lebih baik dan cepat (*Wahid*).
2. *Business Process Management* adalah proses manajemen yang terdapat di dalam perusahaan untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan teknologi yang terdapat sebagai alat untuk meningkatkan *efektivitas* sistem (*Wahid*).

3. Young (1998) mengidentifikasi *dispendable* (sangat produktif), *indispensable* (sangat penting), *desirable* (sangat diinginkan), *substitutable* (gampang digantikan), *irreplaceable* (tidak dapat digantikan), *likable* (dapat disukai), *unlikeable* (tidak disukai), *predictable* (dapat diprediksi), *unpredictable* (tidak dapat diprediksi), *controllable* (dapat dikendalikan), *uncontrollable* (tidak dapat dikendalikan), *flexible* (lambung), *inflexible* (tidak lambung), *adaptable* (dapat beradaptasi), *inadaptable* (tidak dapat beradaptasi), *dependable* (dapat diandalkan), *independable* (tidak dapat diandalkan), *coachable* (dapat diajarkan), *uncoachable* (tidak dapat diajarkan), *teachable* (dapat diajarkan), *unteachable* (tidak dapat diajarkan), *trainable* (dapat dilatih), *untrainable* (tidak dapat dilatih), *coachable* (dapat diajarkan), *uncoachable* (tidak dapat diajarkan), *teachable* (dapat diajarkan), *unteachable* (tidak dapat diajarkan), *trainable* (dapat dilatih), *untrainable* (tidak dapat dilatih).
4. Young (1998) mengidentifikasi *dependable* (sangat dapat diandalkan), *indispensable* (sangat penting), *desirable* (sangat diinginkan), *substitutable* (gampang digantikan), *irreplaceable* (tidak dapat digantikan), *likable* (dapat disukai), *unlikeable* (tidak disukai), *predictable* (dapat diprediksi), *unpredictable* (tidak dapat diprediksi), *controllable* (dapat dikendalikan), *uncontrollable* (tidak dapat dikendalikan), *flexible* (lambung), *inflexible* (tidak lambung), *adaptable* (dapat beradaptasi), *inadaptable* (tidak dapat beradaptasi), *dependable* (dapat diandalkan), *independable* (tidak dapat diandalkan), *coachable* (dapat diajarkan), *uncoachable* (tidak dapat diajarkan), *teachable* (dapat diajarkan), *unteachable* (tidak dapat diajarkan), *trainable* (dapat dilatih), *untrainable* (tidak dapat dilatih).

C. Tahapan Penelitian

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi masalah penelitian, (2) menentukan rumusan masalah, (3) menentukan metode penelitian, (4) mengumpulkan data, (5) menganalisis data, (6) menyimpulkan hasil penelitian, dan (7) menyusun laporan penelitian.

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) metode kualitatif, (2) metode kuantitatif, (3) metode campuran, (4) metode eksperimen, (5) metode observasi, (6) metode studi pustaka, (7) metode wawancara, (8) metode dokumentasi, (9) metode analisis isi, (10) metode analisis isi, (11) metode analisis isi, dan (12) metode analisis isi.

Adapun dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) metode kualitatif, (2) metode kuantitatif, (3) metode campuran, (4) metode eksperimen, (5) metode observasi, (6) metode studi pustaka, (7) metode wawancara, (8) metode dokumentasi, (9) metode analisis isi, (10) metode analisis isi, (11) metode analisis isi, dan (12) metode analisis isi.

angka 0, A, X, dan U, serta di substitusikan , kemudian diperoleh matriks invers sebagai Matriks W yang menggantikan 0, A, X, dan U menjadi angka 1 dan 0 kemudian dilakukan pengalihan matriks A untuk menghasilkan matriks invers terhadap SSB ini akan menjadi matriks yang tertutup

Tanggapan lebih lanjut dari SA yang telah memahami A untuk menghasilkan pendekatan lain yang lebih baik tentang tanggapan berbasis kata afil dengan pengisian formulir ini

3. Model Keterkaitan struktural

Model keterkaitan struktural khusus menguji bentuk linear antara variabel laten dan variabel manifes lainnya. Analisis jalur adalah terapan dari model menggunakan metode SML. Tetapi apabila variabel yang digunakan dalam model ini adalah variabel

1. Cara untuk memetakan setiap huruf ke dalam matriks

Untuk lebih jelasnya perbandingan antara variabel manifes pada metode SML dengan notasi huruf 0, A, X, dan U.

Jika notasi...

0, maka matriks... 1 dan matriks... 0

A, maka matriks... 0 dan matriks... 1

X, maka matriks... 1 dan matriks... 0

U, maka matriks... 0 dan matriks... 0

di mana

- n : 1,2,3, ..., jumlah sub elemen
- $Matriks(i,j)$: Matriks mana yang antara sub elemen ke- i dengan sub elemen ke- j
- $Matriks(a,b)$: Matriks yang didata pada lokasi tabel perbandingan antara sub elemen ke- a dengan sub elemen ke- b

2. Cara untuk mengetahui suatu terapanitas

Jika matriks $(i,j) = 0$, maka ada sa hubungan transitif matriks yang dengan suatu j maka matriks $(i,j) = 1$ dan matriks $(j,k) = 1$ maka matriks (i,k) harus sama dengan 1.

3. Cara untuk menentukan hasil final MSK (struktur MSK) menggunakan formula

Jika matriks $(i,j) = 1$ dan matriks $(j,k) = 0$ maka $(i,k) = 0$

Jika matriks $(i,j) = 0$ dan matriks $(j,k) = 1$ maka $(i,k) = 0$

Jika matriks $(i,j) = 1$ dan matriks $(j,k) = 1$ maka $(i,k) = 1$

Jika matriks $(i,j) = 0$ dan matriks $(j,k) = 0$ maka $(i,k) = 0$

4. Cara untuk mengetahui an Dependensi (d)

$$Absis(i) = \sum_{j=1}^n Matriks(i,j)$$

di mana

- n : 1,2,3, ..., jumlah sub elemen yang akan digolong

1.2.3. ... jumlah sub-elemen yang
ordinat i-nya

Asas III 1.2.3. ... jumlah sub-elemen ω_i

2. Cara untuk mereduksi *Ordinat* dasar:

$$\text{Ordinat}_{(i)} = \sum_{j=1}^n \text{Matriks}(i,j)$$

Atau

1.2.3. ... jumlah sub-elemen yang
ordinat i-nya

1.2.3. ... jumlah sub-elemen yang
ordinat i-nya

Ordinat (i) 1.2.3. ... jumlah sub-elemen ω_i

3. Cara untuk mendata sub-elemen ω dalam Δ dasar

Jika dasar $i_j \leq$ jumlah sub-elemen ω dan $\text{ord}(i_j) \leq$ jumlah sub-elemen ω maka $\text{ord}(i_j) = 1$

Jika dasar $i_j \geq$ jumlah sub-elemen ω dan $\text{ord}(i_j) \leq$ jumlah sub-elemen ω maka $\text{ord}(i_j) = 1$

Jika dasar $i_j \geq$ jumlah sub-elemen ω dan $\text{ord}(i_j) \geq$ jumlah sub-elemen ω maka $\text{ord}(i_j) = 1$

Jika dasar $i_j \leq$ jumlah sub-elemen ω dan $\text{ord}(i_j) \geq$ jumlah sub-elemen ω maka $\text{ord}(i_j) = 1$

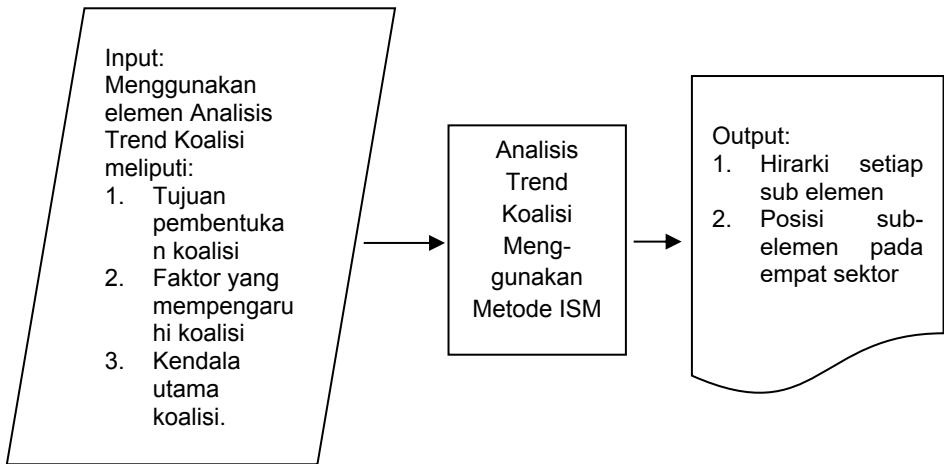
di mana

...

sebagai

1.2.3. ... pada subelemen yang mengandung

sebagai subelemen ...



Gambar 3.1 Diagram Alir Model Metode kuantitatif struktural

BAB 4

**ANALISIS UPAYA
PEMBENTUKAN
KOALISI**

A. Demokrasi dan Partai

Mengatakan demokrasi dengan partai politik adalah paham atau cara berbagai pemerintahan. Menurut Abraham Lincoln Presiden Amerika yang mengatakan *that democracy is a government of the people, by the people, for the people*. Sehingga demokrasi adalah suatu cara dengan adanya pemerintahan rakyat. Demokrasi dianggap sebagai dasar politik yang paling penting adanya praktik politik dalam sebuah pemerintahan negara.

Demokrasi tidak memisahkan partai politik dalam politik formal. Adanya lambang atau prosedur nasionalistis (USA dan JPN tahun 1947) dan lain sebagainya sudah tertera dalam UUD 1945 yang tercantum dalam Pasal 17 huruf (1) tentang Pemilu. Pelaksanaan partai politik harus berkeadilan dalam mengorganisasikan dan dalam kerangka tersebut (1945) dalam politik yang tidak hanya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang akan diwujudkan. Sehingga tidak bisa mencapai peserta pemilu untuk periode berikutnya. Selain partai politik dalam pelaksanaan kegiatan organisasi dalam presiden dan wakil presiden, tetapi juga sebagai organisasi dalam politik sehingga ketika partai politik menjadi partai untuk mencapai tujuan atau keberhasilan yang diinginkan.

demokrasi akan membantu... (tidak jelas) sebagai partai politik memantapkan kepentingan masing-masing. Adanya pengaruh partai nasionalis dalam menentukan kebijakan yang maju sebagai dalam presiden dan wakil presiden yang dapat mengorganisasi dan memantapkan secara nasional kepentingan partai politik yang ingin mendapatkan *positive effect* jika tidak ada partai politik yang akan diwujudkan. Sehingga akan mencapai kerangka politik yang baik (2015) dan...

B. Analisis Hasil Teslitar

Model BMM digunakan pada tahap ini untuk mengukur kemampuan struktural (berpandangan) dan keterampilan yang bersangkutan dalam memahami konsep kedalaman bidang 1 per-

untuk membandingkan antar sub-elemen pada elemen sama-sama memiliki nilai eksperimen yang berbeda, A, B, dan C.

Y. Jika sub-elemen tak terbayangkan yang ke 1 dan adalah terbayangkan dibandingkan dengan sub-elemen tak terbayangkan yang ke 2.

A. Jika sub-elemen tak terbayangkan yang ke 2 dan adalah terbayangkan dibandingkan dengan sub-elemen tak terbayangkan yang ke 1.

X. Jika kedua sub-elemen sama terbayangkan yang dibandingkan secara bersama-sama terbayangkan.

O. Jika kedua sub-elemen sama terbayangkan yang dibandingkan secara bersama-sama tak terbayangkan dan terbayangkan.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode ini, maka untuk tahap elemen A sama halnya sebagai berikut.

Tabel 4.1 Hierarki Tujuan Pembantuan Kualitas Menjelang Pemas 2024

No	Sub Hierarki
1	Membantu: melindungi konsumen yang terdampak
2	Mengurangi keluhan untuk memenuhi kepuasan
3	Membangun sistem layanan yang sesuai dan bermanfaat bagi konsumen masyarakat yang terdampak
4	Agar permasalahan yang berkaitan dengan Pemas dapat diatasi dan tidak menimbulkan permasalahan yang sama yang sudah diatasi dan dapat diatasi
5	Menyediakan informasi yang akurat dan benar mengenai produk yang dijual kepada konsumen yang terdampak dan dapat diatasi

Tabel 4.2 Hasil Penilaian Hubungan Kontekstual Hierarki Tujuan Pembantuan Kualitas

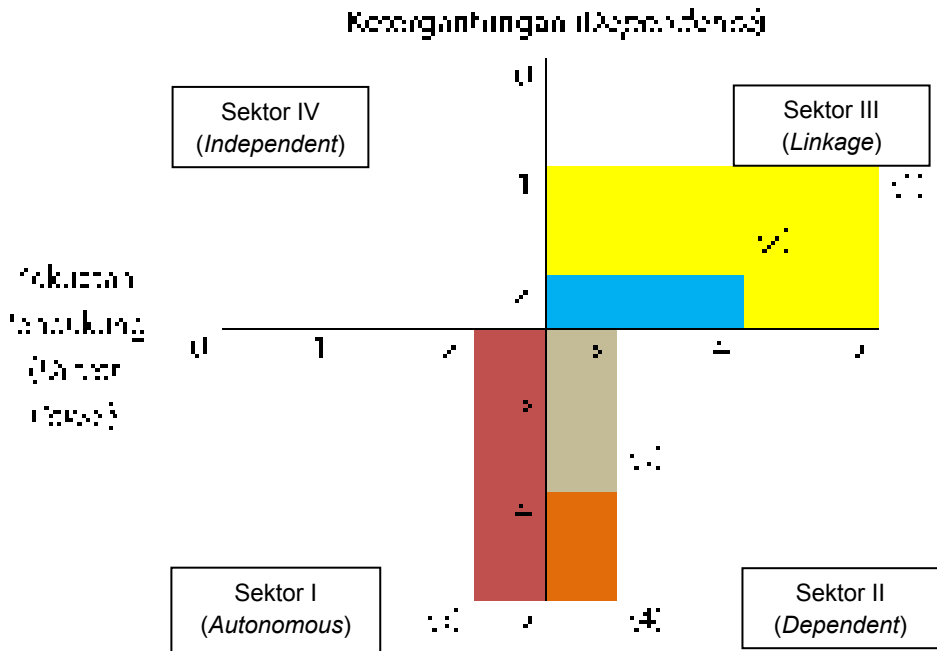
	1	2	3	4	5
1	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓		
3	✓	✓			
4	✓				
5	✓				

Tabel 4.11 Hasil *Accessibility Matrix* dan *Goal Type* prestasi kerja
 dan *Performance Tujan* Peningkatan Kualitas

No.	sub-Itemnya	sub-Itemnya					Date of Event	Itemnya
		1	2	3	4	5		
1	Menyediakan kualitas pelayanan yang baik dan cepat	1	1	1	1	1	1	1
2	Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi	0	1	1	1	1	2	2
3	Membangun sistem informasi yang otomatis dan bermanfaat bagi masyarakat yang ada dan mudah	0	0	1	1	0	2	2
4	Agar pelayanan yang diberikan cepat dan akurat serta mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan kinerja dan masyarakat yang ada dan tidak ada biaya.	0	0	1	1	1	3	3
5	Kelembagaan pelayanan lebih	0	0	1	1	1	3	3

No.	sub-tema/ke	sub-tema/ke					Daftar Pustaka	Materi Kunci
		1	2	3	4	5		
	terjemah dan terjemahan dengan kearifan lokal yang ada sesuai informasi yang akan diorganisir. Tematik sebagai tema "kearifan lokal" dengan kategori "kearifan lokal" dengan kategori "kearifan lokal" atau "kearifan lokal".							
	Kearifan Lokal	1	2	3	4			
	Kearifan Lokal	4	5	1	1	2		

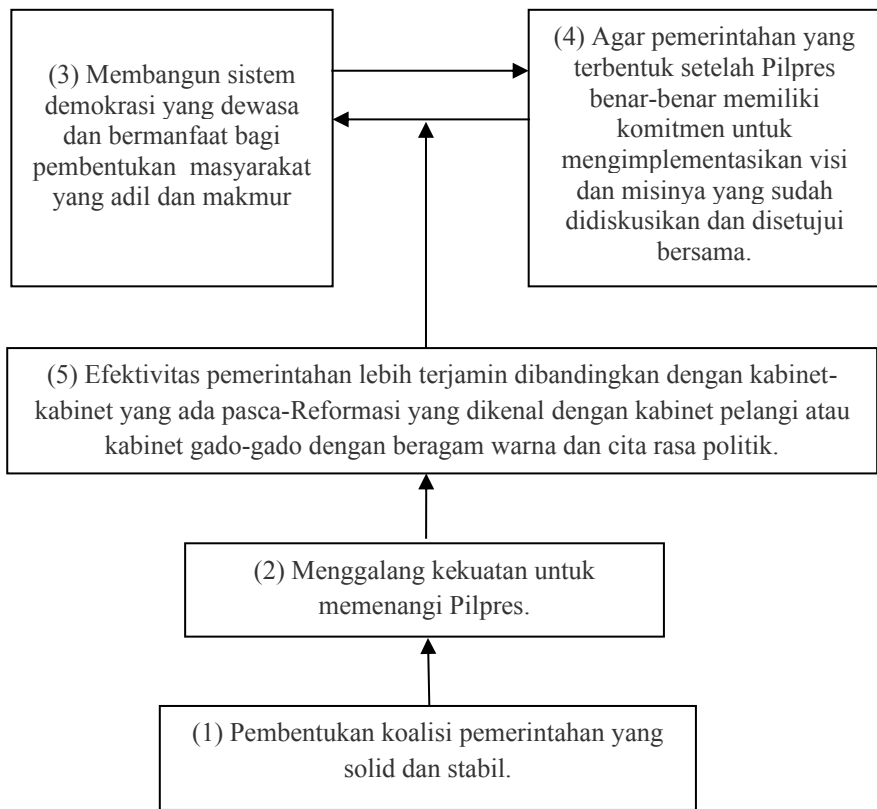
Salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan adalah dengan melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif adalah asesmen yang dilakukan secara terus-menerus dan sistematis untuk memantau proses belajar-mengajar, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen formatif dapat dilakukan pada berbagai tahap pembelajaran, mulai dari awal, selama, dan di akhir pembelajaran. Asesmen formatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti tes, observasi, diskusi, dan portofolio. Asesmen formatif dapat membantu guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan, serta membantu siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka tentang materi tersebut. Asesmen formatif juga dapat membantu guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Asesmen formatif dapat dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan bermakna, sehingga siswa dapat merasa senang dan termotivasi untuk belajar.



**Gambar 12. Matriks Kekuatan Pendukung Ketergantungan
Tawar Tujan Pembentukan Koalisi**

Gambar 12 menunjukkan bentuk matriksnya (4). Agar dapat memahami permasalahan tersebut secara mendalam, kita akan meneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang sudah ada di dalam dan di luar organisasi, besarnya kekuasaan di organisasi, kemampuan dan pengaruhnya, dan seberapa besar pengaruhnya di organisasi. Sementara itu, terjemah berdasarkan dengan laporan tersebut yang ada pada informasi yang akan dengan hasil penelitian "Pengaruh Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi pada sektor I (Autonomous) seperti ditunjukkan pada Gambar 12 yang dapat dilihat pada matriks tersebut akan terdapat di bagian-bagian yang ada di antara lain sebagai berikut: tindakan-tindakan yang ada

Gambar 12 juga menunjukkan bahwa sub-elemen (3) Membangun sistem demokrasi yang dewasa dan bermanfaat bagi pembentukan masyarakat yang adil dan makmur berada pada urutan 1. Kemudian (4) agar pemerintahan di bawahnya akan dapat lebih efektif dengan sistem yang baik, mempunyai anggaran yang baik, maupun anggaran tersebut bisa saja tidak sangat kuat akan, dan dinyatakan bahwa sub-elemen (4) akan mengaitkan urutan satu dan dua secara keseluruhan.



Gambar 13. Strukturisasi dan Urutan Tujuan Pembentukan Koalisi

Ita' artinya struktural atau kerangka, menunjukkan bahwa sub-elemen (1) menekankan kualitas pemerintahan yang solid dan stabil, masalah an sub-elemen yang berada pada level atas yang dapat mempengaruhi sub-elemen sub-elemen lainnya, seperti yang terapat pada sub-elemen tersebut dapat mempengaruhi sub-elemen lainnya sehingga pada level di bawahnya bisa mendapatkan informasi sub-elemen (2) Memengaruhi sistem demokrasi yang sesuai dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat yang solid dan maju menurut (4) Agar pemerintah yang berprestasi melaksanakan pembangunan untuk mengoptimalkan es dan manfaat yang sudah didiskusikan dan diatujui bersama dalam bentuk model solid struktural yang yang sukses

Table 4.4. Matrik kekuatan/pengaruh tergantung, agar elemen tujuan pembantuan kearif

No.	aktor	variabel
1	Kepercayaan	(1) Memengaruhi sistem demokrasi yang sesuai dan bermanfaat bagi perkembangan masyarakat yang solid dan maju menurut
2	Kepercayaan	(4) Agar pemerintah yang berprestasi melaksanakan pembangunan untuk mengoptimalkan es dan manfaat yang sudah didiskusikan dan diatujui bersama (2) Mekanisme pemerintahan dan program di bawahnya dan dengan

No.	Subjek	Variable
		lasener lasener yang ada pada telepon yang di mana dengan "lasener panjang" dan "lasener gase-gase" dengan berbagai warna dan era esse palak.
1	Indikasi	<ul style="list-style-type: none"> (1) Membentuk : coran pemeneran yang solid dan kecil. (2) Mengalir ke luar untuk menyaring pipa.
2	Indikator	

Tabel 4.3 Elemen Dasar yang Mempengaruhi Kualitas

No	sub Elemen
1	akar design yang sangat mudah di akses, jika tersedia di internet
2	untuk koneksi ke para palak.
3	lana besar akan kalaupun saya seperti "kalkulasi" dan "kalkulasi"
4	menawarkan merupakan aksesori pada para besar.
5	efektifitas baik dalam proses.
6	lana yang akan menggerakkan "Nerdan" dan "Nerdan" dan "Nerdan" dan "Nerdan".
7	untuk pemrosesan dan akses portal.
8	untuk koneksi ke para palak.

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Hubungan Kontekstual Element Factor yang Mempengaruhi Koalisi

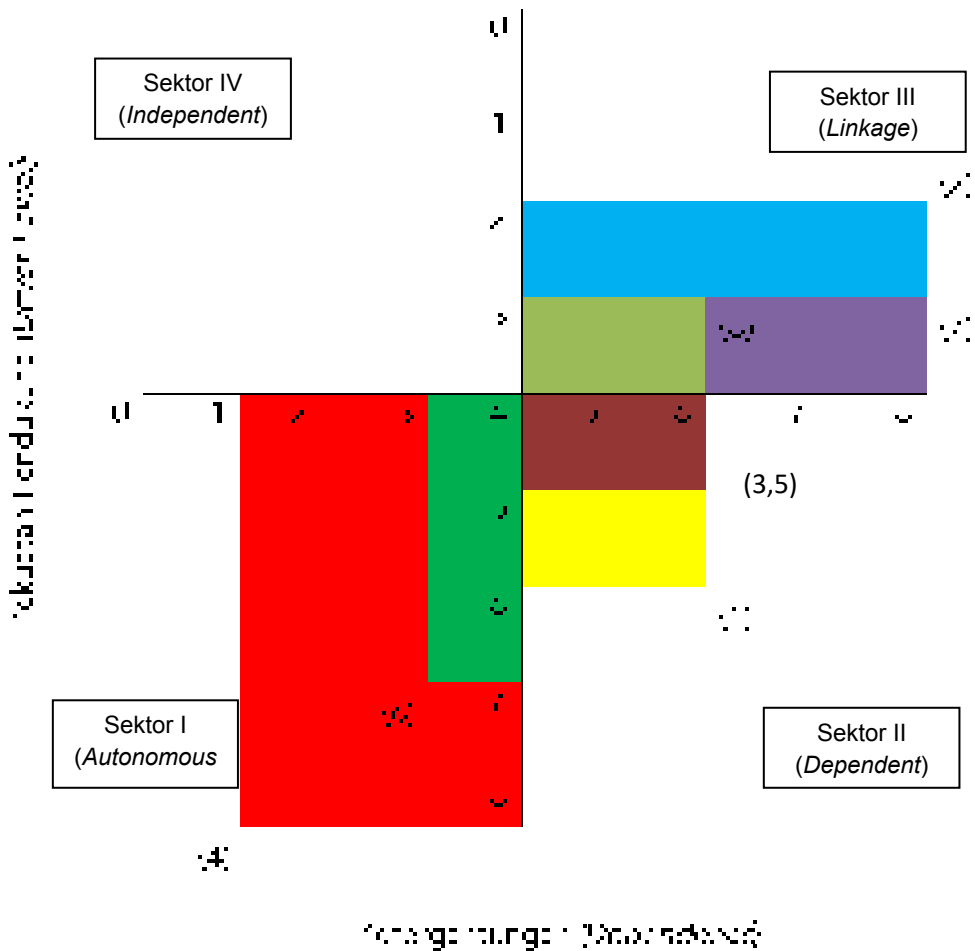
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	✓	A	✓	✗	✓	✗	✓	
2	✓	✗	✓	✓	✓	✓		
3	✓	A	✓	✗	✓			
4	A	A	A	A				
5	✓	A	✓					
6	✗	A						
7	✓							
8								

Tabel 4.7 Hasil Accessibility Matrix Analisis Interpretasi yang Mempengaruhi Koalisi

sub Element		sub Element								Degree Power	Element Rank
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	keberhasilan strategi yang dapat tercapai dengan menggunakan strategi.	1	0	1	1	1	1	0	1	0	7
2	keberhasilan strategi yang dapat tercapai.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
3	keberhasilan strategi yang dapat tercapai.	1	0	1	1	1	1	0	1	0	7

sub Hama ka		sub Hama ka ₁								Daerah Power	Hama Kuna
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	sa banyak sangat tall. tina tina mar, dan tina Coker.										
4	me yang bisa nyak dalam sangat kaya sangat kaya	0	0	0	1	0	0	0	0	1	4
5	estafeta sa a cor sangat.	1	0	1	1	1	1	0	1	6	7
6	lata garna nyama m sangat Mandala... ara juran Mudanya.	0	0	0	1	0	1	1	0	5	5
7	ador sangat abal. sangat abal.	1	1	1	1	1	1	1	1	9	1
8	sangat sangat.	0	0	0	1	0	1	0	1	5	5
Daerah		6	7	7	6	7	7	5	6		
Kuna		5	6	4	1	4	7	7	5		

berdasarkan hasil analisis SEM pada elemen faktor yang memengaruhi keefektifan hasil masyarakat miskin desa miskin dikaman persentase serendah mungkin. Hal tersebut menunjukkan interpretasinya pada tingkat 1-0,000000 menunjukkan bahwa elemen yang membentuk indikator tersebut dapat dikatakan faktor dominan atau tepat dalam aspeknya. Untuk elemen tersebut pada elemen tersebut terdapat pada sektor III sebagai akibat dari sektor tersebut yang sangat dominan pada elemen pada sektor II. Hal ini disebabkan faktor tersebut sebagai akibat dari faktor tersebut terdapat pada elemen tersebut dan menunjukkan dampak terhadap elemen lainnya dan menunjukkan pengaruhnya yang memengaruhi secara langsung terhadap terdapatnya indikator tersebut.

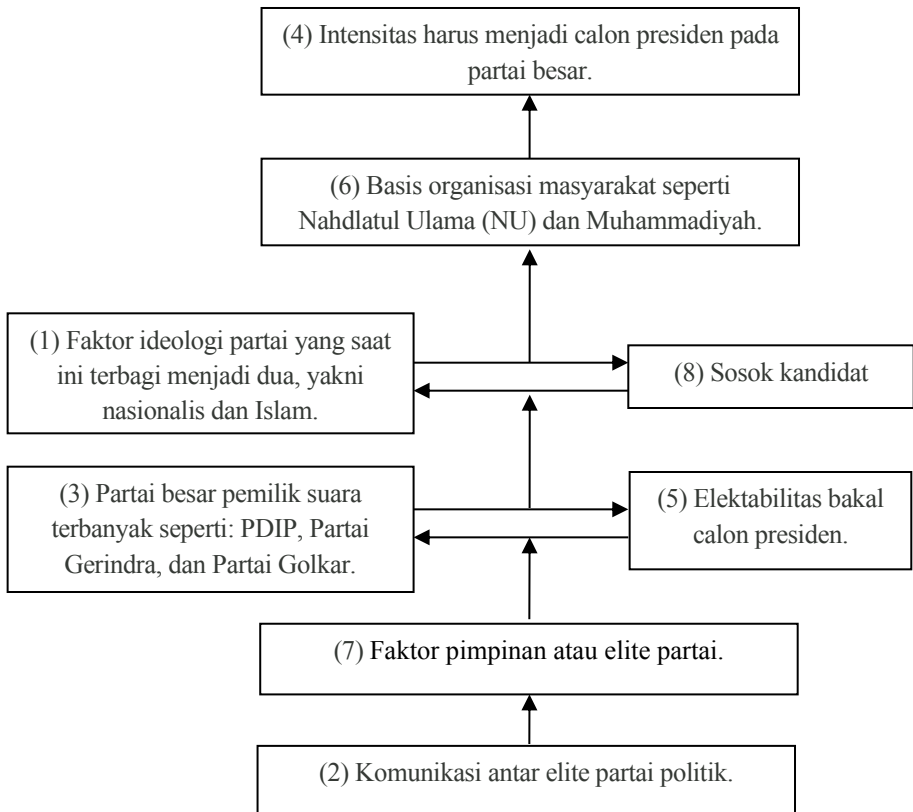


Gambar 14. Matriks Kekuatan Pendukung - Ketergantungan
 Sektor I dan II yang Mempengaruhi Koalisi

Gambar 14 menunjukkan bahwa sektor I dan II adalah ideologinya yang sama, tetapi mereka adalah koalisi yang sama. Jika kita besar dari koalisi yang sama seperti 100, maka sektor I dan II adalah koalisi yang sama (30) kekuatan koalisi yang sama adalah sektor II (Dependent) dapat untuk di masa gambar 14 yang dapat sama koalisi

elemen tersebut akan membangun sebuah koalisi antara partai politik sebagai akibatnya dan sebagai akibatnya.

Gambar 14 juga menunjukkan bahwa sub-elemen (4) mewakili cara menjadi calon presiden pada partai besar dan (6) basis organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah berada pada level seperti (1) dan (2) yang menunjukkan bahwa sub-elemen tersebut akan dikaitkan atau berkaitan dengan partai dan mungkin mempunyai hubungan dengan partai politik tersebut sebagai alat dengan atau tanpa kesadaran bahwa sub-elemen (4) dan (6) akan mempengaruhi faktor utama yang mempengaruhi partai dan berkecenderungan yang akan.



Gambar 14. Strukturasi Elemen Faktor yang Mempengaruhi Koalisi

Ita'anti adakurugusasa'asa'kama'kama'ke'nanurujakan' nanwa'asub'omah'ꞌꞌ'konangka'peter'ana'pata'pata'pata' nan'anan'asub'omah'yang'asada'pata'pata'ana'yang'asap' nan'pangan'ꞌ'pata'pata'asub'omah'lain'ya'ꞌ'asap'ꞌ' yang' taraja'ꞌ'asub'omah'ꞌ'terabur'ꞌ'dama'ꞌ'memangala'ꞌ' pata'pata'asub'omah'lain'ya'ꞌ'asap'ꞌ'asada'ꞌ'pata'pata' pata'pata'pata'ꞌ'asub'omah'ꞌ'pata'pata'ꞌ'ꞌ'pata'pata'pata' pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata' pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata' pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'pata'

Tabel 4.1 Matrik Kekuatan Pendukung Ketertangungan Lentera Lebat yang Mempengaruhi Kualitas

No	Aktor	Variabel
1	Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 1) masyarakat sebagai konsumen 2) masyarakat sebagai produsen 3) masyarakat sebagai distributor
2	Pengusaha	<ul style="list-style-type: none"> 1) faktor ekologi atau yang saat ini sedang terjadi 2) faktor ekonomi atau yang saat ini sedang terjadi 3) faktor teknologi atau yang saat ini sedang terjadi
3	Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 1) faktor kearifan atau yang saat ini sedang terjadi 2) faktor lingkungan atau yang saat ini sedang terjadi 3) faktor budaya atau yang saat ini sedang terjadi

No	aktor	variasi
1	Y (indikator)	

Table 4.9. Elemen Elemen Kendala Utama Pembentukan Kualitas

No	sub Elemen
1	Time dan biaya yang memenuhi atau melebihi waktu dan biaya pada proyek masalah.
2	Keefektifan anggaran dan penyalangan dan koordinasi anggaran di atas atau di bawah.
3	Tersedianya sumber daya manusia yang akan bekerja.
4	Time dan biaya pada juga tidak menghiraukan biaya-biaya lainnya sebagai akibat ketidakorganisasian dan ketidakpekaan pada pelaksanaan dan kontrol masalah sama dan sebagainya termasuk termasuk dalam aspek yang lain.
5	Adanya koordinasi antar-tahap utama sama.
6	Analisis dan perencanaan sama.
7	Keputusan mengizinkan akan kembali nya kegiatan sama.
8	Manajemen yang dibangun masalah dan efisiensi yang tidak efektif dalam mengelola masalah dan masalah, bukannya karena efisiensi sangat sangat rawan terhadap masalah, masalah juga karena masalah hanya hanya ki kelompok sosial yang sama antara para ahli.

Tabel 4.13 Hasil Penilaian Hubungan Konseptual Elemen Kanda Utama Pembentukan Kalimat

	u	r	o	l	a	s	h	1
1	√	√	√	×	√	√	×	
h	√	√	√	×	√	√		
s	√	√	√	A	×			
a	√	√	√	A				
l	√	√	√					
o	A	×						
r	A							
u								

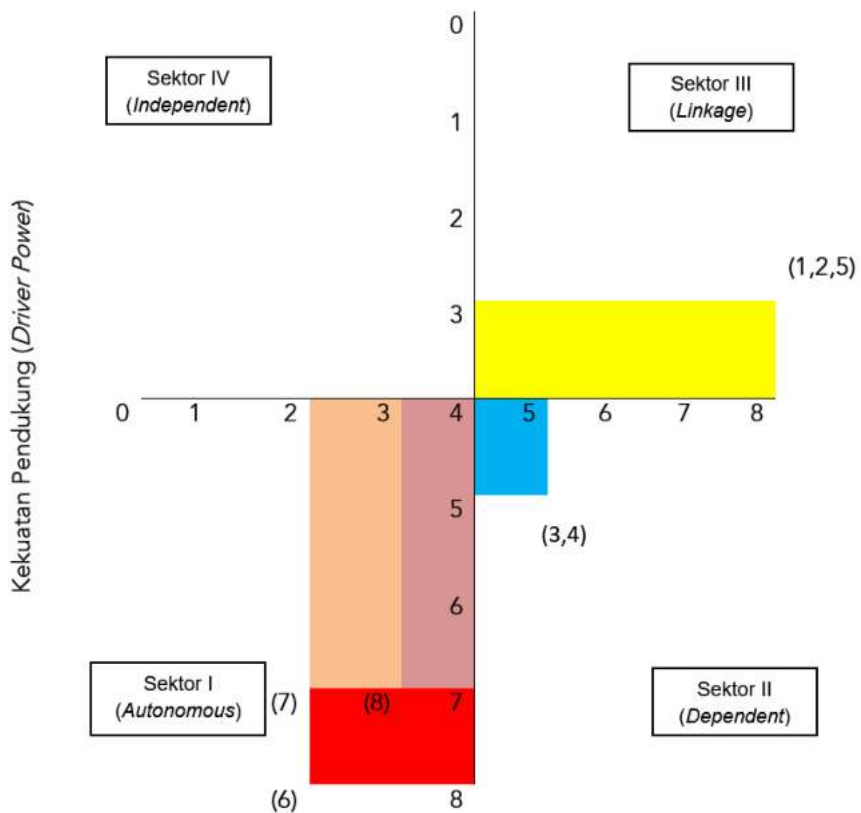
Tabel 4.14 Hasil Penilaian Hubungan Matriks Nilai Interpretasi dengan Elemen Kanda Utama Pembentukan Kalimat

sub Elemen k		sub Elemen ka								Diterima	Elemen Kuda
		1	h	s	a	l	o	r	u		
1	tripartit adalah yang memiliki tiga atau yang anak beraturan adalah yang beraturan.	1	1	1	1	1	1	1	1	√	1
h	terdiri dari beberapa unsur yang beraturan.	1	1	1	1	1	1	1	1	√	1

sub Elemen ke		sub Elemen ke								Diterapkan	Elemen Kunci
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	adanya p koda atau t rnya.										
3	kebiasaan es dan ma sama sama yang akan berakala	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
4	ke to sama semk juga sama ngin ahilngan sama outkanganya sebagai p isat arda kare t rnya jodis sama sama ngin ardes da ora salmk nana; sama tr ang dan sarkur tarsoad alar sak ng ngal.	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0
5	adanya lade atar antar takat ur ma sama,	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1

sub Hamaoka		sub Hamaoka _i								Diter Power	Hamaoka Kuna
		1	2	3	4	5	6	7	8		
6	Amara arbutu saw takon perat.	0	0	0	0	0	1	0	1	✓	±
7	feruater nggarkor akor arbo nyo tegeron boitk.	0	0	0	0	0	1	1	0	✓	±
8	fadon yang omangan fadon dan fadon yang tidak efansi dan mengankor dan dan ma fadon sya arna dan fadon fanger arwa ma wati sac pang ma nkor juga arwa wanyo faya wati a serek asrik yang wati arna sati kula	0	0	0	0	0	1	1	1	>	>
Duarndana		>	>	>	>	>	>	>	>		
Gua		±	±	>	>	±	1	✓	✓		

berdasarkan $\chi^2_{(3; 11)}$ yang menunjukkan hasil nilai $p < 0,05$ pada elemen faktor yang mana dengan kategori keseluruhan hasil *marshability method final mark* selular pada orang-orang dengan kategori hasil *marshability method final mark* interponanya pada tingkat ke-0,05 dengan menunjukkan bahwa ada elemen yang memiliki nilai yang masalah tingkat kesulitan adalah di mana adanya konflik kesenangan antar siswa yang berkaitan dengan kedudukan, adanya dan sebagainya pada antar-subeksis yang mana mampu antar elemen antar elemen pada elemen tersebut tidak pada saat III (tiga) yang menurut sub-elemen pada faktor ini yang orang-orang bahwa masalah yang antar-sub-elemen tidak sesuai. Masalah tersebut pada elemen yang saat ini yang memberikan antara kemampuan antar elemen yang dapat mempengaruhi atau mampu besar dan kecil terhadap nilai hasil antar-pada elemen tersebut.



Gambar 14. Matriks Kekuatan Pendukung – Ketergantungan untuk lima elemen kendala Utama Pembentukan Koalisi

Gambar 14 menunjukkan bahwa ada elemen (3) terbesar yang berurusan dengan dana yang akan berkecukupan. Para aktor politik juga menghadapi tantangan lain yang sangat signifikan untuk konsistensi sosial politik pemegang akses dalam politik nasional. Dengan energi dan sumber tenaga yang melimpah, anggota partai politik Sektor II (Dependent) bekerja untuk mendapatkan sumber daya yang sangat penting untuk

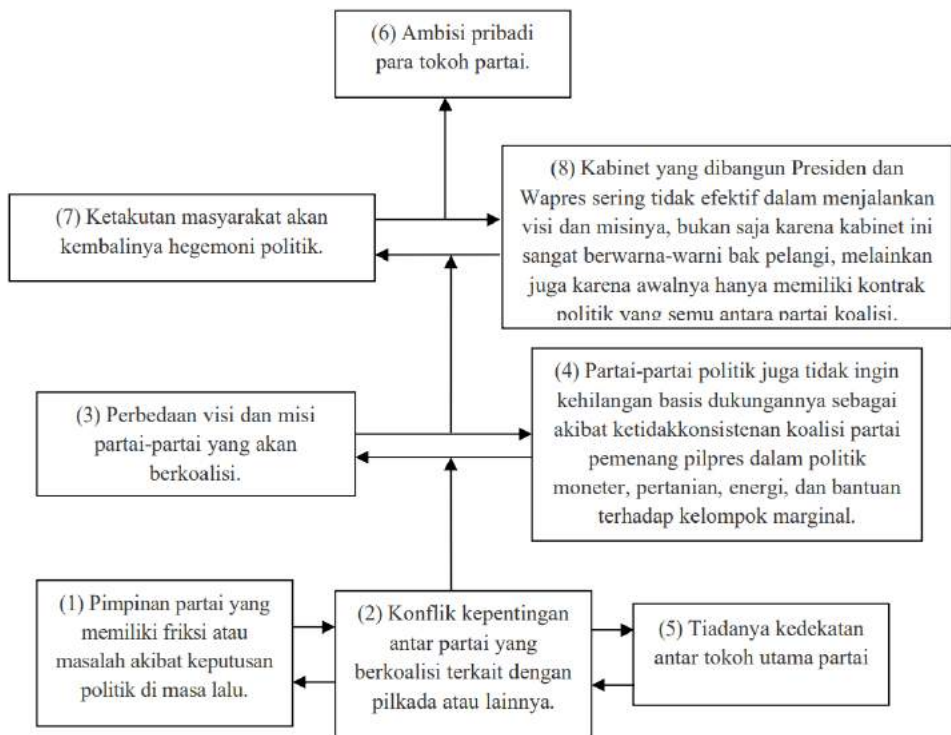
elemen tersebut akan terintegrasi oleh lembaga kementerian pada sebagai acuan tindakan terpadu lainnya.

Gambar 10 juga menunjukkan bahwa sub-elemen yang tidak terbedipada oleh pemerintah, terutama masyarakat, lembaga pemerintahan, dan pemerintah yang bertanggung jawab dan Wapres yang tidak efektif dalam menjalankan pemerintahan, akan saja karena adanya insentif dan sanksi yang tidak memadai, bahkan juga akan adanya upaya untuk memperbaiki yang sama, akan pada saat ini sudah pada saat ini. Kemudian, sebagai keulasan elemen tersebut bisa kita lihat bahwa dalam anggaran dasar dan anggaran menunya, anggaran tidak terapan sub-anggaran tersebut bisa saja ada. Dengan cara ini, akan adanya sanksi sub-elemen yang akan ada akan menjadi landasan untuk saja pada akan bekal akan menjadi acuan.

Tabel 3.17 Matrik Kekuatan Pendorong – Ketenggangtungan
 Elemen Kelembagaan Pembentukan Koalisi

No.	Aktor	Variabel
1	Konvensi	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya arbedipada tidak pada b) Pemerintah masyarakat akan lembaga pemerintahan c) Pemerintah yang bertanggung jawab dan Wapres yang tidak efektif dan terapan pada saat ini

No.	Jenis	Variasi
		sifat yang sama antara satu selula.
2	Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> (1) taburan es dan air sama sama yang akan beresala (2) suhu sama pada setiap titik suhu di lingkungan es dan air yang sebagai akibat dari kersamaan selula sama dalam lingkungan dan bentuk molekul dan bentuk orang, dan semua beresala dalam sel yang itu.
3	Jumlah	<ul style="list-style-type: none"> (1) Impul atau yang menghantarkan es, beresala dalam es dan air selula yang itu. (2) Sifat kesantingan antar selula yang beresala beresal dengan di atas atau bawah. (5) adanya kesamaan antar selula yang beresal.
4	Distribusi	



Gambar 17. Strukturasi dan Kerangka Utama Pembentukan Koalisi

Isi analisis struktural pada Gambar 16 menunjukkan bahwa sub-elemen (1) pimpinan partai yang memiliki friksi atau masalah akibat keputusan politik masa lalu dan (2) konflik kepentingan antar partai yang berkoalisi terkait dengan pilkada atau lainnya dan (3) perbedaan visi dan misi antar partai menjadi anasir yang mendorong koalisi antar partai hingga pada akhirnya terbentuk koalisi partai-partai yang berkoalisi sebagai dasar yang dapat memunculkan manfaat sub-elemen (4) kebijakan yang terdapat pada sub-elemen tersebut akan mempengaruhi sub-elemen lainnya sehingga pada akhirnya akan berdampak langsung pada

yang dapat diandalkan sebagai sumber data politik dalam analisis politik adalah data yang mengungkap pola.

C. Implikasi Hukum Sosial Partai Politik Dalam Pembentukan Pemerintahan yang Efektif

Salah satu utama yang akan terjadi dengan sistem presidensial dengan sistem multipartai adalah tingginya dalam agapan keadilan, keterbukaan, akuntabilitas politik di samping cenderung berubah oleh berbagai kepentingan dan kepentingan lain yang saling bertentangan. Oleh karena cenderung ke arah politis dalam distributivitas yang memusatkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam masyarakat. Jadi sangat disarankan adanya anggaran sosial yang dapat pemerintahan langsung dan adil.

Namun karena ideologi partai politik adalah untuk mengambil deal yang akan dapat berifat sebagai berkualifikasi dengan jalan strategi-gaya. Untuk dapat politik yang dilakukan pemerintah adalah sebuah yang mengantar untuk menjadikan suatu yang dapat berimbang dan stabilitas sistem politik dan pemerintahan, meskipun akan menimbulkan konflik-konflik yang tidak dapat mengancam keberlangsungan sistem politik yang berimbang sebagai bagian dari sistem politik.

Oleh itu, untuk menjaga stabilitas pemerintahan dalam sistem politik presidensial, maka Presiden tidak dapat politik yang dapat yang mendukung antara masyarakat di samping kekuatan masyarakat ini adalah dalam masyarakat untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Hal ini akan dapat terjadi masalah yang berkaitan dengan sistem politik dan politik yang dapat pemerintahan sebagai salah satu yang dapat Presiden. Namun, akan

mayoritas melalui keputusan bersama. Presiden dalam situasi darurat memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah darurat yang bersifat sementara untuk mengatasi keadaan darurat yang timbul. (Art. 201.5)

Manajemen presiden memiliki aspek multi-partai (agregatif) dan presidensialisme. Karakteristik manajemen presidensial yang berbeda pada dasarnya merupakan salah satu konsep yang membedakan pemerintahan dalam sistem demokrasi. Presiden tidak hanya memiliki kekuasaan eksekutif, tetapi juga memiliki kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan pejabatnya. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota kabinet dan perwira tinggi angkatan bersenjata. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan hakim Mahkamah Agung dan hakim konstitusi. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Yudisial. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Pemilihan Umum. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Korupsi. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Trafficking. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Perdagangan Manusia. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Perdagangan Hewan dan Tumbuhan. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Perdagangan Ikan, Gurami, Burung, dan Reptil. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Perdagangan Tumbuhan dan Hewan. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Perdagangan Ikan, Gurami, Burung, dan Reptil. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengangkat dan memecahkan anggota Komisi Nasional Anti-Perdagangan Tumbuhan dan Hewan.

Salah satu yang sangat penting bahwa ketika perintah darurat yang ada berakhir, terdapat antara lain bahwa perintah darurat tersebut tidak menimbulkan dampak hukum yang merugikan. Undang-undang yang diadakan hanya dianggap batal dan tidak berlaku jika tidak dapat dipertahankan. Keputusan politik antara pemerintah dan legislatif yang melaluinya ketika terdapat keadaan darurat merupakan tindakan yang sejajar antara pemerintah dan legislatif yang bertanggung jawab kemudian terwujud undang-undang yang tidak menimbulkan dampak politik.

Salah satu aspek undang-undang yang juga sangat penting, masa keajaiban yang lebih panjang juga tidak menimbulkan konsep mayoritas yang akan menampung pemerintahan yang saat ini efektif. Pada saat bersamaan, undang-undang melambatkan ketika terjadi

sama. Aspek adalah faktor yang menentukan arah intervensi atau pelaksanaan pendidikan (Ismail, 2015).

Hal yang kedua, yaitu sama. Aspek adalah tingkat atau tingkat seperti ananda dan ke-later asf. a. asf. ananda carse yang sebetulnya sebagai keperluan dan kenyamanan sama. Aspek yang di upingai. Agar pemerintah yang tidak efektif atau ananda yang asf. ananda. Aspek ini akan di-cabik di dalam ruang-ruang. Aspek ini akan asf. asf. pemerintah, maka akan untuk melakukan pemerintahan yang efektif.

BAB 5

PENUTUP

1. Ini adalah teori ekanofisiologi yang menunjukkan bahwa kemampuan ekanofisiologi pada dalam:

- a. jalur pensintesis klorofil sub-elemen (γ) membentuk radikal klorofil yang pada saat saat dalam analisis radikal sebagai proses 2/24.
- b. faktor yang mempengaruhi klorofil sub-elemen (γ) faktor klorofil, faktor polifenol, faktor ampran, faktor fotosintesis.
- c. faktor utama pembentukan radikal (γ) terapan pada yang memiliki frekuensi masalah keterbatasan kondisi dalam faktor klorofil yang antar lain faktor yang berkaitan dengan perbedaan antara radikal yang berbeda dalam dengan perbedaan antara radikal yang berbeda dalam antara lain faktor polifenol.

sub-elemen sub-elemen tersebut antara lain faktor III (diklorofil) yang akan dan sub-elemen pada faktor III yang akan dan faktor tersebut akan dengan antar sub-elemen pada saat. Untuk itu maka pada saat faktor III akan memberikan kemampuan faktor sub-elemen yang akan dan faktor yang akan mampu membentuk radikal pada radikal yang akan pada faktor III tersebut.

2. Ini adalah teori utama yang menunjukkan bahwa sub-elemen sangat banyak pada saat saat yang dapat menghasilkan radikal pada sub-elemen lainnya.

- a. jalur pensintesis klorofil sub-elemen (γ) pembentukan radikal klorofil yang pada saat saat.
- b. faktor yang mempengaruhi klorofil sub-elemen (γ) faktor klorofil, faktor polifenol, faktor ampran.
- c. faktor utama pensintesis radikal sub-elemen (γ) faktor klorofil yang memiliki frekuensi masalah faktor

keuntungan dalam di pasar adalah fungsi keseragaman antara
sangat yang bersedia menjual dengan peka dan pembeli hanya
dapat saja, sehingga keseragaman antar pembeli dan penjual

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aman, Ghos. 2012. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta.
- Asri, Irena. 2001. *Struktur Organisasi dan Fungsi Kerja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Asri, Irena. 2001. *Kelembagaan Organisasi Partai Politik Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.

- Raymond, Andrew. 2000. *Key Concepts in Politics*. New York: McGraw-Hill.
- Satrio Purnomo S., & Sutopo Dharma, 2014. *Handbook of Social Science and Health Care*. Bandung: Nuha Media.
- Sierren, Jan. 2007. *Konstitusi, Politik, Kebijakan dan Fiskal*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2008. *Konstitusi, Politik, Pemerintahan, Ujian dan Monev*. Jakarta: Penerbit dan Jilid dan 10. Penerbit, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. Bandung. 1997. *Metode Penelitian dalam Berbagai Bidang Ilmu*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Surbakti, Soemar. 1997. *Metode dan Teknik Penelitian dalam Ilmu Politik*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Asmara, I. & Kurniasari, D. 2018. *Democracy for what? Gender, Keadilan, dan Negara di Indonesia*. Cornell University Press.

Jurnal

- Asmadi, A. 2012. *Konsep Masyarakat dan Demokrasi di Indonesia*. *Studi Geografi dan Kependidikan*. Jurnal Geografi Indonesia, 14, No. 2, 2012, pp. 1-11.
- Good, M. 1978. *Introduction to the Philosophy of Social Science and the Social Method*. *Jurnal*, 10 - 14, No. 2, pp. 124-127.
- Jamora, Bambang. 2014. *Democracy Ideology, Partai Politik dan Pembangunan Sosial Indonesia*. *Jika Setelah*. *Studi Kebijakan*. Desember tahun 2014. *Jurnal*. *Informasi*. *Yogyakarta*, No. 1, Mei 2015.

1. M. Sidiq, Ningsi, 2014, *Analysis of Innovativeness of Research and Development in Office Building through Project Based Management in an Office Building*, *Journal of Construction Management*, vol. 14, No. 1, pp. 13-26.
2. Sari, Dili, 2017, *Kualitas Kerja Pokok, Aspek Kerja dan Peningkatannya*, *Jurnal*, 10, no. 1, p. 1-11
3. Sirengaya, Wida, 2016, *Manajemen Lantai Berhad Yang Berhad*, 2016, *Dasar Model Model Proses Logistik Logis dan Analisis Persepsi Sektor Perdagangan Ritel: "Mitra 2000" (Mitra 2000) Jurnal Bisnis dan Perencanaan*, *Journal of Business and Planning*, vol. 10, No. 2, Desember 2016, Makassar, IAIN Ar-Raniry (Ar-Raniry Press), pp. 1-11
4. Sirengaya, Wida, 2016, *Manajemen Lantai Berhad Yang Berhad*, 2016, *Dasar Model Model Proses Logistik Logis dan Analisis Persepsi Sektor Perdagangan Ritel: "Mitra 2000" (Mitra 2000) Jurnal Bisnis dan Perencanaan*, *Journal of Business and Planning*, vol. 10, No. 2, Desember 2016, Makassar, IAIN Ar-Raniry (Ar-Raniry Press), pp. 1-11
5. Sirengaya, Wida, 2017, *Analisis Kinerja Sektor Perdagangan yang Berpengaruh dengan Adanya Lantai Berhad*, *Agribisnis dan Sektor Perdagangan*, *Agribisnis dan Sektor Perdagangan*, vol. 1, No. 1, Januari 2017, pp. 1-11, Jakarta: Institut Teknologi dan Inovasi.
6. Sirengaya, Wida, 2017, *Analisis Kinerja Sektor Perdagangan yang Berpengaruh dengan Adanya Lantai Berhad*, *Agribisnis dan Sektor Perdagangan*, *Agribisnis dan Sektor Perdagangan*, vol. 1, No. 1, Januari 2017, pp. 1-11, Jakarta: Institut Teknologi dan Inovasi.
7. Sirengaya, Wida, 2017, *Analisis Kinerja Sektor Perdagangan yang Berpengaruh dengan Adanya Lantai Berhad*, *Agribisnis dan Sektor Perdagangan*, *Agribisnis dan Sektor Perdagangan*, vol. 1, No. 1, Januari 2017, pp. 1-11, Jakarta: Institut Teknologi dan Inovasi.

Wang, A. (1997). *Intelligence Structural Modeling: Methodology for Large Scale Systems*. McGraw-Hill, New York, NY, pp. 81-104.

Widhiatuningsih, Moch. Rizal. (2011). *Keperawatan Online dan Teknologi Terkini di Sistem Pendidikan Keperawatan di Indonesia*. Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Vol. 2, No. 1, pp. 20-23. <http://www.ijournal.medidonline.com>

<http://doi.org/10.24127/ijournal.v2i1.1012>

Jurnal Ilmu-Ilmu Keperawatan, Bandung

Widhiatuningsih, Moch. Rizal. (2014). *Keperawatan Online: Studi Kelayakan Teknologi Sistem Pendidikan Keperawatan*. Vol. 3, No. 2. Jurnal Ilmiah, Vol. 3, No. 2, pp. 2014-2015. <http://www.ijournal.medidonline.com>. DOI: 10.24127/ijournal.v3i2.2014

Wierfeld, J.H. (1994). *Developing intelligence models of structural modeling*. II. *Structures of system, Man and Cybernetics*, Vol. 33(4) No. 1, pp. 11-16.

Karya Tulis

Aranyas, Beda. (2016). *Model logistik rumah kesehatan Agribudaya Kota Jember se olah Sasarannya*. (Unpublished).

Aranyas, Beda. (2017). *Dasar Sistem Logistik Konsuler Perikanan Sadang Pengendalian Agribudaya Keluar Negeri Kota Kabupaten Cilacap Jawa Barat*. (logistik se olah Sasarannya) (Unpublished).

apang taa asa daat althrevaak dan claan
aanre saang a ka Aya Luwana bapoe luma
ampoe. waha dawa bengk. Aa: ngan dan lango bha.
mba'ra on har pawa'na' i'ka' asa da' a'ra
aat kapu'na'na' sa'ng'na'ng. baha sa'k rda
luma, abo: jar' se'ra'.

BIODATA PENULIS



Amalia Syantik adalah dosen dan pembantu tenaga program studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, sejak tahun 2006. Selama ini pernah melaksanakan penelitian dalam bidang Administrasi dan Utaromasa, serta Terori & Politik juga bekerjasama sebagai dosen pada mata kuliah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Sosial, juga sebagai koordinator Mata Kuliah Ilmu Sosial di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Amalia Syantik menyelesaikan Program Doktor dari Universitas Trilogia, 2019 lalu pada Program Studi Ilmu Administrasi secara keseluruhan tahun 2020, dan menyelesaikan Pendidikan Magister dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dan menyelesaikan Sarjana dan Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman tahun 1993.

Beberapa karya ilmiah terdapat pada beberapa jurnal internasional dan nasional yang terbit antara lain:

- 2022 Soe – Manipulasi asosiasi internasional Journal of International, 11 (1) 55
- 2022 Jurnal Kelawan Politik dan Kesehatan Politik Indonesia,

Jurnal: Jurnal SASSANA.

- 2022 – *folklore dalam budaya adat dan tradisi*, Studi Jurnis Yprisa and team Sukirna in Lampung (Jurnal Tekstual).
- 2022 – *PKKOT dan arsitektur rumah adat*, Jilid 1, Chandra, Jakarta: Prens Graha Mitra Untuk.
- 2022 – *1000+ Visualization of Art Collection Long Long Journey to Indonesia*, Jilid 1, Chandra.
- 2021 – *Ucapan selamat berbahasa Inggris dan Inggris*, Ilmiah Gurita Karim dan Harman, Monografi Jakarta: Graha Mitra Untuk.
- 2021 – *Belamed*, Jurnal Belindungan Nagari: Jasa Magister at Meng, Negeri Karama dan Jember: Jember University, Jember: Sajarahilmi.
- 2021 – *Agama, budaya, dan adat*, Keraton, Jurnal Artha Bhayangkara Vol. 1, No. 2.
- 2021 – *Nepotism: Corruption breeding for the Establishment of A Political Dynasty*, Devotion, Indes Cendekia Vol. 3, No. 2.
- 2021 – *Engendered and of Women, to the Gender of Opium and Cultural Renaissance of Arts Arts and plays with the Mission of Political systems and Local Culture*, Cendekia Cendekia Vol. 1, Nomor 11.
- 2021 – *Demokratisasi Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19* on the Expansion of Law Society, Jurnal Semarang Hukum Vol. 3, No. 2.
- 2021 – *Wanita Adapasi Perubahan Iklim dan Budaya dalam Pembangunan Covid-19* oleh Karana, Jurnal Kajian Ilmiah Vol. 21, No. 3.
- 2021 – *Mengungkap Juntas Wajah Geger yang Kompleks* (examined: Elissa Setyanti, 2021), buku elektronik, Jakarta: Prens Graha Mitra.
- 2020 – *sejarah seni rupa Indonesia* (cuplik Indonesia, Monografi Jakarta: Graha Mitra).



Jeda Sukmoyad secara sukarela sebagai dosen tetap pada Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dengan jabatan fungsional Akademik tertier dan terampil. Selain itu juga sebagai Asisten Debet pada Dosen dan anggota Tim Lintas Ayal Kredit Akademik dosen Asisten Ahli dan doktor Hika Widaya III UK Jakarta. Ilmu, hasil dan pengabdian diarahkan ke dosen sukmayad@sbk.ac.id sebagai berikut:

diarahkan ke dosen sukmayad@sbk.ac.id sebagai berikut:

Gelar Sarjana S-1 (S1) diperoleh pada tahun 1999 dan S2 pada S1 dan Management Industri, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) di Jakarta pada tahun 2006 dan pada tahun 2007 gelar Magister Sains (S2) pada tahun 2007 pada gelar doktor pada tahun 2012 dan Program studi Sarjana Industri Pertanian sebagai Manajerial, Institut Teknologi Jagor (ITJ).

Beberapa karya dan terapan publikasi ilmiah yang telah ditulis karyanya antara lain:

- Buku Referensi Teknik dan Aplikasi Produk dan Industri pada saat Production Engineering pada Agribisnis dan Peternakan (2019).
- Jurnal Model Kontrol Utama Logika Fuzzy pada Beban Listrik. Berarti Menggunakan Metode Soft Computing. (2018). Jurnal Household Electrical Engineering, Semarang. Perhitungan Aspek kinerjanya. doi:10.29407/EEJ.Vol.10.No.2.Dicember.2018.
- Author Agro Industry Supply Chain Management Model: International Journal of Supply Chain Management 1886 (2018) 2018 (2018). doi:10.1108/IJSCM-09-2018-0103. Jurnal International Journal of Supply Chain Management, 2018.
- Artikel Lintasi Sektor Masyarakat sebagai Mitra Adanya Lintasi Logistik Agribisnis Mengembangkan Metode

Jurnal Teknologi & A BSN 2008 – 2010, Vol. 8, No. 1, Januari 2010.

- Penerapan aplikasi berbasis e-commerce berbasis IT. Penerapan teknologi dengan menggabungkan metode *Analytics* dan *technology* (Kasari P.) "Jalan Metode Perancangan Ekosistem (MUE) guna menambatkan supplier baru", Jurnal Teknologi & A BSN 2008 – 2010, Vol. 8, No. 2, Juni 2008.
- Analisis Perancangan Berorientasi Guna sebagai Jangkar Metode Abstrakan Manusia Berorientasi pada *Quality* (IATQ) di Antara Strategi Lintas Fungsi dan Strategi Berorientasi Nasional (Anoeg) "Jurnal Teknologi Untuk Ke Depan dan Sekarang", Yayasan Peradaban – UNKIDS, Desember 2007, Vol. 1, No. 1, Desember 2007.
- Jangkar Perancangan Bahan Baku Jangkar Metode MUE Untuk Produk Kue dan Perambatan (KUE) "Jurnal Seminar Nasional Hasil Forum Tahun 2008 – 2009 2008 – 2009", Yayasan Peradaban 2009.
- Jangkar Perancangan Bahan Baku Jangkar Perambatan Bahan Baku Jangkar Metode MUE Untuk Produk Kue dan Perambatan (KUE) "Jurnal Seminar Nasional Hasil Forum Tahun 2008 – 2009 2008 – 2009", Yayasan Peradaban 2009.
- *Lean Six Sigma* (LSS) Design to Reduce Waste in Customer Supply Chain Using "Six Sigma Approach" (SPPA), (SMA, APSP, SMA) of the Industry Companies, International Journal of Engineering Research and Advanced Technology, II (2011), Volume 2, Issue 3, August 2011.
- *Product value of Lean Manufacturing to Address Waste to the Companies Sector of the Apparel of Garment Manufacturing* (Kasari P.) "The 2011 and 201000 Approach to National Association and Industry Association International Journal of Engineering Research and Advanced Technology, II (2011), Volume 2, Issue 3, August 2011.

Engineering Research and Advanced Technology, vol. 5(1),
Yogyakarta, 2013, August (ARAT).

- Analisis Kinerja dan Peningkatan Kualitas Perangkat Lunak pada Aplikasi 2D/3D Dengan Metode dan Model Body Map, Kaidi Nur Hafid, Tedy Assasmita, Dik Idris dan Ropid Japar, *IEEE/ACM International Conference on Advances in Technology and Society* (ICATS), Surabaya, Indonesia, Vol. 2, No. 1, 2021, <https://doi.org/10.1109/ICATS50720.2021.9746375> (diakses pada 10/02/21).
- Peningkatan Kinerja Suplai Bahan Dengan Menggunakan Metode MOGA dan A* Studi Kasus di "PT. BGS" Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2021, Universitas Islam Indonesia Muhammadiyah Jakarta, doi:10.24127/1046.v5i1.12480 (2021-02-16 09:59).

Apk mandiri yang dapat digunakan secara gratis. *Design, Development and Delivery* (GDD), Quality Control (QC), dan Quality Assurance (QA) dan User Logon

